



**PERBANDINGAN TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM SISWA ASUH  
SEBAYA (SAS) ANTARA SMA NEGERI 1 GIRI DENGAN SMA NEGERI  
1 GLENMORE DI KABUPATEN BANYUWANGI**

*(The Comparison Effectiveness of Siswa Asuh Sebaya (SAS) Program between Senior  
High School 1 Giri with Senior High School 1 Glenmore in Banyuwangi City)*

**SKRIPSI**

oleh

**Nanda Bintang Syahputra**

**NIM 150910201007**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**PERBANDINGAN TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM SISWA ASUH  
SEBAYA (SAS) ANTARA SMA NEGERI 1 GIRI DENGAN SMA NEGERI  
1 GLENMORE DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

**Nanda Bintang Syahputra**  
**NIM 150910201007**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. kedua orang tua tercinta, Ibu Yuliana dan Bapak Heriyanto, S.Pd. yang telah membesarkan penulis dengan segala kasih sayang, kesabaran dan selalu memberikan dukungan melalui do'a dan motivasi di setiap langkah penulis;
2. adik tersayang Gita Rahma Ayuningtyas dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan serta doanya;
3. guru-guru penulis di TK PGRI Glenmore, SDN 2 Sepanjang, SMP Bustanul Makmur, SMA Negeri 1 Giri yang telah mendidik penulis sehingga mampu menghantarkan ke bangku perkuliahan;
4. para Kyai dan Nyai serta keluarga besar pondok pesantren Bustanul Makmur tempat penulis menimba ilmu agama;
5. almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**HALAMAN MOTTO**

“Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya”

(terjemahan QS. Al-Baqarah: ayat 286)<sup>1</sup>

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya  
bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(terjemahan QS. Al-Insyirah: ayat 5-6)<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Indonesia. <http://quran-id.com> [diakses tanggal 18 September 2019]

<sup>2</sup> Al-Qur'an Indonesia. <http://quran-id.com> [diakses tanggal 18 September 2019]

**HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Bintang Syahputra

NIM : 150910201007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Perbandingan Tingkat Efektivitas Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore di Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 November 2019

Yang menyatakan,

Nanda Bintang Syahputra

**HALAMAN PEMBIMBINGAN**

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM SISWA ASUH  
SEBAYA (SAS) ANTARA SMA NEGERI 1 GIRI DENGAN SMA NEGERI  
1 GLENMORE DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh:

Nanda Bintang Syahputra

150910201007

Pembimbing

Pembimbing Utama : Rachmat Hidayat S.Sos, MPA., Ph.D.

Pembimbing Anggota : Dr. Sutomo, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Perbandingan Tingkat Efektivitas Program Siswa Asuh Sebaya antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore di Kabupaten Banyuwangi” karya Nanda Bintang Syahputra telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 15 Oktober 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP  
NIP. 197410072000121001

Anggota I,

Anggota II,

Rachmat Hidayat S.Sos, MPA., Ph.D.  
NIP. 198103222005011001

Dr. Sutomo, M.Si  
NIP. 196503121991031003

Anggota III,

Anggota IV,

Drs. Boedijono, M.Si  
NIP. 196103311989021001

Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si  
NIP. 198210292015041001

Mengesahkan

Pejabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP. 196106081988021001

## RINGKASAN

**Perbandingan Tingkat Efektivitas Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore di Kabupaten Banyuwangi;** Nanda Bintang Syahputra; 150910201007; 2019; 178 Halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya kuantitas atau kualitas dari keluaran (*output*). Karena kualitas output dapat menggambarkan efektivitas suatu program maka dalam penelitian ini persepsi atau penilaian output oleh siswa penerima bantuan SAS akan dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore melalui beberapa indikator diantaranya: akses, cakupan, frekuensi, bias, service delivery, akuntabilitas dan service delivery.

Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian komparatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa penerima bantuan program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 43 siswa. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sensus. Sampel penelitian di SMA Negeri 1 Giri berjumlah 34 siswa sedangkan sampel di SMA Negeri 1 Glenmore berjumlah 9 siswa. Hasil analisis data dengan menggunakan teknik *Independent sampel t test* menyatakan bahwa  $t_{hitung}$  sebesar -699 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 168,2. Artinya, nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-699 < 168,2$ ) sehingga keputusan dalam uji hipotesis penelitian ini adalah hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak artinya tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore di Kabupaten Banyuwangi.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Tingkat Efektivitas Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore di Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Rachmat Hidayat S.Sos, MPA., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberi bimbingan, dorongan, perhatian dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Sutomo, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang dengan penuh kesabaran memberi bimbingan, dorongan, perhatian dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
4. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;
5. Ibu Rini Astuti Puspa H, S.Pd., selaku pembina pengurus SAS di SMAN 1 Giri yang telah mengizinkan serta memberikan kemudahan data bagi penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar;

6. Ibu Titik, S.Pd., selaku pembina pengurus SAS di SMAN 1 Glenmore yang telah mengizinkan serta memberikan kemudahan data bagi penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar;
7. Mielda, Wilda, Annisa, dan Frida selaku pengurus SAS di SMAN 1 Giri yang dengan senang hati selalu bersedia membantu penulis mulai proses observasi hingga tahap distribusi kuesioner;
8. Afifah, Ruli, Yoga, dan Yulinda selaku pengurus SAS di SMAN 1 Glenmore yang dengan senang hati selalu bersedia membantu penulis mulai proses observasi hingga tahap distribusi kuesioner;
9. Kedua orang tua tercinta, Ibu Yuliana dan Bapak Heriyanto, S.Pd. serta adik tersayang Gita Rahma Ayuningtyas yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat PENA (Indah, Tessa, Mary, Icha, Nafiatus, Hilda, dan Ello) yang bersedia menjadi partner diskusi selama penulis kuliah;
11. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara angkatan 2015 yang telah memberikan kenangan yang berkesan selama penulis kuliah;
12. Kemenristek Dikti yang telah memberikan beasiswa Bidik Misi kepada penulis.
13. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Jember, 15 November 2019

Penulis

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>11</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
<b>2.1 Kebijakan Publik</b> .....	<b>17</b>
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	17
2.1.2 Tahap-Tahap Penyusunan Kebijakan Publik .....	19
<b>2.2 Evaluasi Kebijakan Publik</b> .....	<b>21</b>
2.2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik .....	21
2.2.2 Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik .....	24
2.2.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik .....	24

<b>2.3 Efektivitas</b> .....	<b>27</b>
2.3.1 Pengertian Efektivitas .....	27
2.3.2 Indikator Kualitas Policy Output .....	28
<b>2.4 Program</b> .....	<b>32</b>
<b>2.5 Teori Masyarakat Prismatik</b> .....	<b>34</b>
<b>2.6 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>37</b>
<b>2.7 Hipotesis</b> .....	<b>41</b>
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
<b>3.1 Tipe Penelitian</b> .....	<b>42</b>
<b>3.2 Tempat dan Waktu Penelitian</b> .....	<b>43</b>
3.2.1 Tempat Penelitian .....	43
3.2.2 Waktu Penelitian.....	43
<b>3.3 Populasi dan Sampel</b> .....	<b>43</b>
3.3.1 Populasi.....	43
3.3.2 Sampel.....	43
<b>3.4 Variabel Penelitian</b> .....	<b>44</b>
3.4.1 Definisi Konseptual .....	44
3.4.2 Definisi Operasional Variabel .....	46
<b>3.5 Jenis dan Sumber Data</b> .....	<b>50</b>
<b>3.6 Skala Pengukuran</b> .....	<b>51</b>
3.6.1 Skala Likert .....	51
3.6.2 Transformasi Data .....	51
<b>3.7 Metode Pengumpulan Data</b> .....	<b>53</b>
<b>3.8 Uji Instrumen Penelitian</b> .....	<b>54</b>
3.8.1 Uji Validitas .....	54
3.8.2 Uji Reliabilitas.....	56
<b>3.9 Teknik Pengolahan Data</b> .....	<b>57</b>
<b>3.10 Uji Prasyarat Analisis Data</b> .....	<b>58</b>
3.10.1 Uji Normalitas .....	58
3.10.2 Uji Homgenitas .....	59
<b>3.11 Teknik Analisis Data</b> .....	<b>60</b>

<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>64</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b> .....	<b>64</b>
4.1.1 Sejarah Sekolah.....	64
4.1.2 Profil Sekolah.....	66
4.1.3 Profil Program Siswa Asuh Sebaya (SAS).....	69
4.1.4 Kondisi Geografis.....	76
<b>4.2 Deskripsi Responden</b> .....	<b>78</b>
4.2.1 Umur Responden.....	78
4.2.2 Jenis Kelamin Responden.....	79
<b>4.3 Deskripsi Hasil Pengukuran Variabel</b> .....	<b>80</b>
4.3.1 Variabel Independen.....	80
4.3.2 Perbandingan Jawaban Reponden.....	82
<b>4.4 Uji Instrumen</b> .....	<b>90</b>
4.4.1 Uji Validitas.....	90
4.4.2 Uji Reliabilitas.....	91
<b>4.5 Transformasi Data</b> .....	<b>92</b>
<b>4.6 Uji Prasyarat Analisis Data</b> .....	<b>93</b>
4.6.1. Uji Normalitas.....	93
4.6.2 Uji Homogenitas.....	94
<b>4.7 Analisis Data</b> .....	<b>95</b>
4.7.1 Uji Independent Sample T Test.....	95
4.7.2 Perbandingan Mean Indikator Penelitian Berdasarkan Mean... ..	98
<b>4.8 Pembahasan</b> .....	<b>104</b>
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	<b>112</b>
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	<b>112</b>
<b>5.2 Saran</b> .....	<b>113</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>121</b>

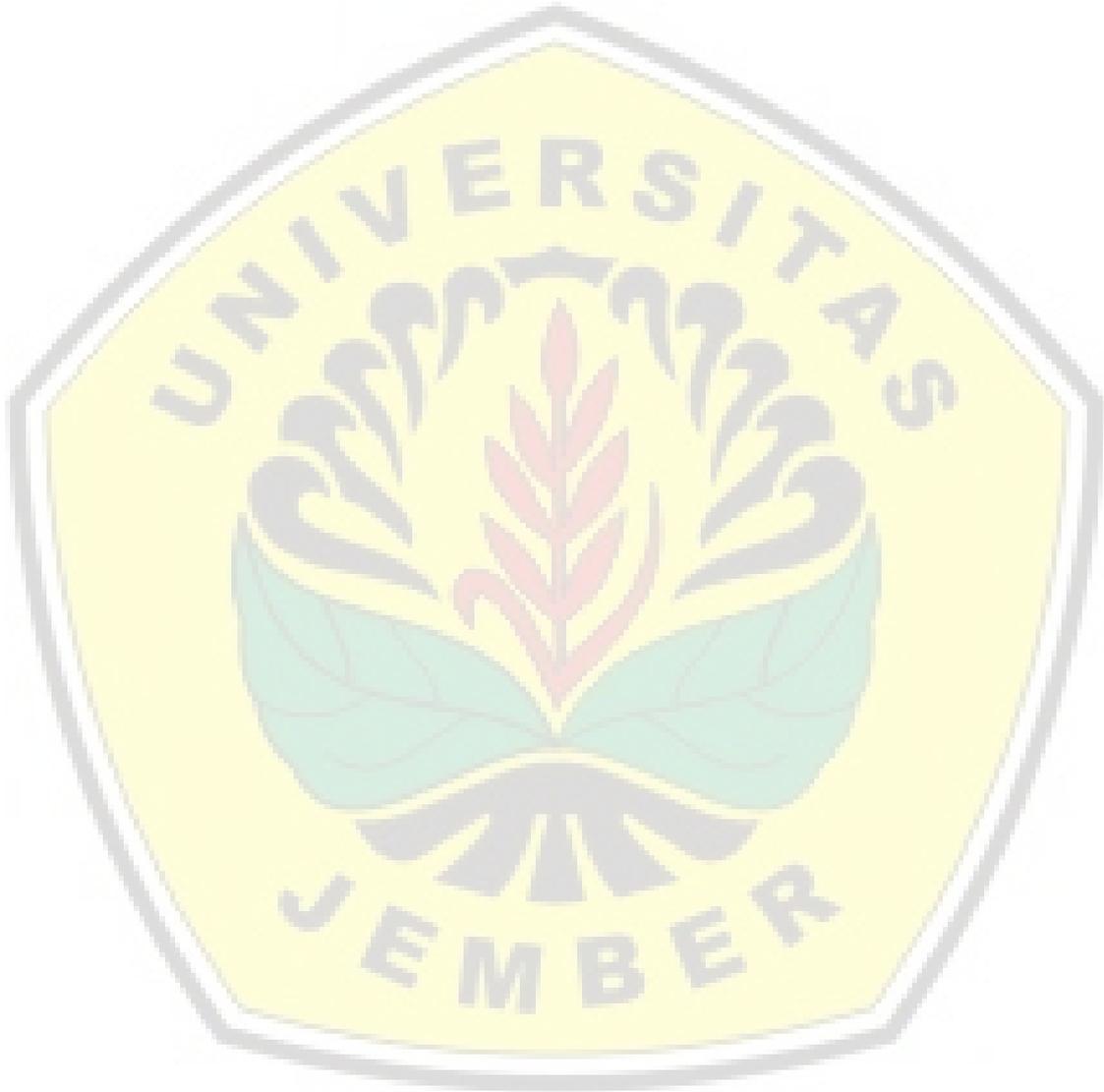
**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Realisasi Indikator Urusan Pendidikan Kab. Banyuwangi .....	5
Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi .....	25
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	49
Tabel 3.2 Skoring Item Skala Likert.....	51
Tabel 4.1 Struktur Organisasi SMAN 1 Giri.....	67
Tabel 4.2 Struktur Organisasi SMAN 1 Glenmore .....	69
Tabel 4.3 Struktur Kepengurusan SAS SMAN 1 Giri.....	71
Tabel 4.4 Laporan Hasil Penggalangan Dana SAS di SAS SMAN 1 Giri.....	72
Tabel 4.5 Rata-Rata Donasi SAS per Siswa di SMAN 1 Giri .....	73
Tabel 4.6 Struktur Kepengurusan SAS SMAN 1 Glenmore.....	74
Tabel 4.7 Laporan Hasil Penggalangan Dana SAS di SAS SMAN 1 Glenmore .....	75
Tabel 4.8 Rata-Rata Donasi SAS per Siswa di SMAN 1 Glenmore .....	76
Tabel 4.9 Kondisi Geografis SMAN 1 Giri .....	77
Tabel 4.10 Kondisi Geografis SMAN 1 Glenmore .....	77
Tabel 4.11 Daftar Umur Responden di SMAN 1 Giri.....	78
Tabel 4.12 Daftar Umur Responden di SMAN 1 Glenmore.....	79
Tabel 4.13 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
Tabel 4.14 Jumlah Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Program SAS di SMAN 1 Giri.....	80
Tabel 4.15 Jumlah Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Program SAS di SMAN 1 SMAN 1 Glenmore .....	81
Tabel 4.16 Perbandingan Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Akses.....	83

Tabel 4.17 Perbandingan Jawaban Responden Berdasarkan Indikator	
Cakupan .....	84
Tabel 4.18 Perbandingan Jawaban Responden Berdasarkan Indikator	
Frekuensi .....	85
Tabel 4.19 Perbandingan Jawaban Responden Berdasarkan Indikator	
Bias .....	86
Tabel 4.20 Perbandingan Jawaban Responden Berdasarkan Indikator	
Service Delivery .....	87
Tabel 4.21 Perbandingan Jawaban Responden Berdasarkan Indikator	
Akuntabilitas .....	88
Tabel 4.22 Perbandingan Jawaban Responden Berdasarkan Indikator	
Kesesuaian Program dengan Kebutuhan .....	89
Tabel 4.23 Hasil Uji Validitas .....	90
Tabel 4.24 Hasil Uji Reliabilitas .....	91
Tabel 4.25 Transformasi Data Ordinal ke Interval .....	92
Tabel 4.26 Hasil Uji Normalitas .....	94
Tabel 4.27 Hasil Uji Homogenitas .....	94
Tabel 4.28 Group Statistics .....	96
Tabel 4.29 Hasil Uji Independent Sample T-test .....	97
Tabel 4.30 Perbandingan Indikator Akses Berdasarkan Mean .....	99
Tabel 4.31 Perbandingan Indikator Cakupan Berdasarkan Mean .....	100
Tabel 4.32 Perbandingan Indikator Frekuensi Berdasarkan Mean.....	100
Tabel 4.33 Perbandingan Indikator Bias Berdasarkan Mean .....	101
Tabel 4.34 Perbandingan Indikator Service Delivery Berdasarkan Mean ....	102
Tabel 4.35 Perbandingan Indikator Akuntabilitas Berdasarkan Mean .....	102
Tabel 4.36 Perbandingan Indikator kesesuaian program dengan kebutuhan	
Berdasarkan Mean .....	103
Tabel 4.37 Rekapitulasi Selisih Mean .....	104
Tabel 4.38 Perbandingan Penyelenggaraan Program SAS .....	105
Tabel 4.39 Perbandingan Hasil Penggalangan Dana SAS .....	107
Tabel 4.40 Perbandingan Rata-Rata Donasi SAS/Siswa .....	108

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	32
Gambar 2.2 Ilustrasi Model Masyarakat Prismatik .....	34



**DAFTAR GRAFIK**

	<b>Halaman</b>
Grafik 4.1 Perbandingan jawaban responden berdasarkan indikator akses dalam persen (%).....	83
Grafik 4.2 Perbandingan jawaban responden berdasarkan indikator cakupan dalam persen (%).....	84
Grafik 4.3 Perbandingan jawaban responden berdasarkan indikator frekuensi dalam persen (%).....	85
Grafik 4.4 Perbandingan jawaban responden berdasarkan indikator bias dalam persen (%).....	86
Grafik 4.5 Perbandingan jawaban responden berdasarkan indikator service delivery dalam persen (%).....	87
Grafik 4.6 Perbandingan jawaban responden berdasarkan indikator akuntabilitas dalam persen (%).....	88
Grafik 4.7 Perbandingan jawaban responden berdasarkan indikator kesesuaian program dengan kebutuhan dalam persen (%).....	89
Grafik 4.8 Perbandingan Hasil Penggalangan Dana SAS.....	107

**DAFTAR LAMPIRAN**

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	121
Lampiran 2 Tabulasi Data .....	123
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas .....	125
Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas .....	131
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas .....	133
Lampiran 6 Hasil Uji Homogenitas .....	139
Lampiran 7 Hasil Uji Independent Sampel T-test .....	141
Lampiran 8 Transformasi Data Ordinal ke Interval .....	143
Lampiran 9 Tabel Nilai-Nilai r .....	147
Lampiran 10 Tabel Distribusi Nilai t .....	148
Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian.....	149
Lampiran 12 Laporan Hasil Penggalangan Dana SAS di SMAN 1 Giri .....	152
Lampiran 13 Laporan Hasil Penggalangan Dana SAS di SMAN 1 Glenmore.....	153
Lampiran 13 Surat Izin Penelitian dari LP2M UNEJ .....	152
Lampiran 14 Surat Izin Penelitian dari DPM PTSP Kabupaten Banyuwangi.....	153
Lampiran 15 Peraturan Bupati Tentang Program SAS .....	148
Lampiran 16 Peraturan Daerah Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.....	149

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita yang termaktub dalam alinea ke-2 pembukaan undang-undang dasar 1945. Cita-cita tersebut akan mudah diwujudkan jika masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang memadai. Pendidikan berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Langkah konkrit yang diambil pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai alinea ke-2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan menjadikan pendidikan sebagai salah satu dari lima sektor prioritas dalam RAPBN 2017. Kelima sektor tersebut adalah infrastruktur, pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. (dalam <https://bisnis.tempo.co/read/796572/rapbn-2017-lima-sektor-prioritas-pemerintah-jokowi/full&view=ok>).

Walaupun pemerintah telah mengalokasikan sebagian besar APBN untuk membiayai sektor pendidikan ternyata biaya pendidikan di Indonesia bukannya justru semakin murah dan terjangkau oleh kalangan perekonomian menengah ke bawah namun yang terjadi justru sebaliknya, biaya pendidikan di Indonesia justru mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sehingga hal ini tentu menjadi beban berat bagi para orang tua terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 mencatat rata-rata kenaikan biaya pendidikan mencapai 10 persen per tahun. Senada dengan BPS, lembaga ZAP Finance bahkan menyatakan biaya pendidikan di negeri ini

kisaran peningkatannya bisa mencapai 20 persen per tahun (dalam <https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/07/17/084700526/kenaikan-gaji-lebih-kecil-dari-kenaikan-biaya-pendidikan-solusinya->). Implikasi dari kenaikan biaya pendidikan ini adalah meningkatnya jumlah siswa putus sekolah di Indonesia.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, mengumumkan hasil penelitian Hasil Bantuan Siswa Miskin Endline di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ada temuan menarik bahwa sebanyak 47,3 persen responden menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31 persen karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4 persen karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilanlainnya. Mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah ini sebagian besar berijazah terakhir sekolah dasar (42,1 persen) maupun tidak memiliki ijazah (30,7 persen). Meski demikian, rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata cukup besar, yakni 93,9 persen. Hanya 6,1 persen yang menyatakan tidak memiliki rencana untuk itu (dalam <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/>).

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Dalyono dalam (Basrowi dan Siti Juariyah, 2010) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan dan lain-lain, semua itu turut mempengaruhi pencapaian belajar anak. Willis dan Setyawan (1984:11) dalam (Arizona, 2012) juga mengungkapkan bahwa kekurangan biaya dapat menyebabkan anak putus sekolah. Saat ini biaya pendidikan cukup mahal sehingga sebagian besar rakyat kecil sulit untuk menjangkaunya terutama yang memiliki tingkat sosial ekonomi rendah.

Mengingat permasalahan pembiayaan pendidikan merupakan penyebab terbesar angka putus sekolah di Indonesia maka dengan ini pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan program yang solutif melalui pemaksimalan peran atau kewenangan dari bentuk desentralisasi yang telah ditransfer oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Seperti pernyataan Cheema dan Rondinelli dalam Hidayat (2017) yang mengatakan *“outline three forms of decentralization, that act as a way for transferring authority, responsibility, and resources-through deconcentration, delegation, or devolution-from the center to lower levels of administrations”*

Banyuwangi merupakan contoh kabupaten di provinsi Jawa Timur yang menawarkan sejumlah program bantuan pendidikan seperti: SAS (Siswa Asuh Sebaya), Garda Ampuh (Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah), Beasiswa Banyuwangi Cerdas, dan pemberian uang saku setiap hari kepada pelajar kurang mampu. Diantara program-program tersebut, Siswa Asuh Sebaya merupakan salah satu inovasi program yang sangat diunggulkan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi.

Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) merupakan salah satu program pendidikan yang beberapa tahun belakangan ini telah mengundang perhatian masyarakat luas. Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) mulai diimplementasikan sejak tahun 2011 lalu oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu inovasi program yang berfungsi mengatasi permasalahan biaya pendidikan.

Siswa Asuh Sebaya adalah program yang bertujuan agar siswa yang berasal dari kalangan mampu secara ekonomi memiliki kepedulian untuk membantu meringankan biaya pendidikan teman-teman sebayanya sesama siswa yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Program ini tidak memiliki alokasi dana dari pemerintah sehingga inisiatif penggalangan dana dan kepedulian hati dari para siswa menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Hasil penggalangan dana tersebutlah yang kemudian akan disalurkan kepada siswa-siswi kurang mampu. Program SAS saat ini telah diikuti oleh seluruh sekolah di Banyuwangi mulai tingkat SD, SMP sampai SMA dengan jumlah 911 sekolah (dalam <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/program-siswa-asuh-sebaya-banyuwangi-raih-penghargaan-kompetisi-pelayanan-publik.html>).

Selain melatih kepedulian siswa untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan teman sebayanya, program Siswa Asuh Sebaya ini juga

mengajarkan siswa-siswi untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam mengelola program SAS mulai menetapkan calon penerima SAS, melakukan penggalangan dana SAS, melakukan pembukuan/laporan sampai dengan mendistribusikan bantuan SAS.

Ide dasar program ini lahir secara spontan, saat Bupati Anas dan Kadispdik Sulihitoyo menghadiri undangan upacara pembukaan MOS di MAN 1 Giri pada Juli 2011. Selepas upacara, Bupati Anas menyampaikan keresahan tentang seragam sekolah siswa yang timpang, ada yang lusuh ada dan yang bagus. Dalam diskusi singkat tersebut, muncullah ide tentang bagaimana siswa yang tergolong mampu dalam satu lingkup sekolah peduli dengan kondisi teman sebayanya yang tidak mampu. Kepedulian itu diwujudkan urunan sukarela, hasil dari urunan dikumpulkan untuk membantu siswa sebaya yang kurang mampu.

Dispendik segera menanggapi ide dari Bupati, beberapa pihak sekolah segera dikumpulkan dan dilanjutkan dengan mengumpulkan OSIS yang kemudian menghasilkan SK Kadispdik tentang imbauan pengimplementasian SAS di SMA-SMK. Percobaan program ini berjalan mulus dan disambut positif oleh pihak sekolah. Cukup tiga bulan setelah program terinisiasi, program tersebut sudah terimplementasi di 25 SMA-SMK pada kisaran Oktober 2011. Agar semakin kuat, program SAS yang bertajuk gerakan moral peduli siswa sebaya itu diluncurkan Bupati Anas pada 2 Mei 2012, tepat saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dari situ, program SAS kemudian berhasil meluas ke seluruh sekolah se-Banyuwangi. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung penuh program tersebut, diterbitkan SK Bupati Nomor 188/182/KEP/429.011/2014 tentang program SAS. Setelah SK itu terbit, SD, SMP, SMA, dan SMK menerapkan SAS secara serentak. (dalam <http://www.jpip.or.id/artikelview-635.html>). Namun, Sejak tahun 2017 bupati Banyuwangi telah menerbitkan peraturan bupati No.24 tahun 2017 sebagai peraturan yang menggantikan SK Bupati Nomor 188/182/KEP/429.011/2014 tentang program Siswa Asuh Sebaya.

Berkat partisipasi siswa yang begitu besar dalam program ini, dana SAS yang terkumpul pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada awal diluncurkan di tahun 2011, total dana SAS yang terkumpul sebanyak Rp 293 juta. Jumlahnya meningkat menjadi Rp 1,05 miliar pada 2012, kemudian melonjak menjadi Rp 2,36 miliar pada 2013. Angka ini kembali meningkat menjadi 2,56 miliar pada 2014 dan Rp. 2,6 miliar pada 2015. Sedangkan pada tahun 2016 ini hingga awal November dana SAS yang terkumpul Rp. 1,89 miliar (dalam <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/program-siswa-asuh-sebaya-banyuwangi-raih-penghargaan-kompetisi-pelayanan-publik.html>).

Program SAS memberikan dampak yang positif setelah beberapa tahun berjalan. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir sejak diimplementasikan tahun 2011 angka putus sekolah di kabupaten Banyuwangi terus mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Realisasi Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	APK (%)					
	- SD/MI/Paket A	106,68	102,91	104,93	109,02	103,60
	- SMP/MTs/ Paket B	97,27	101,44	103,26	100,67	101,14
	-SMA/SMK/MA/ Paket C	59,25	76,68	76,71	76,75	83,32
2	APM (%)					
	- SD/MI	98,47	98,10	98,41	99,91	99,93
	- SMP/MTs	80,45	84,32	88,64	88,67	88,76
	- SMA/SMK/MA	44,89	57,02	60,81	68,84	68,90
3	Angka Putus Sekolah (%)					
	- SD/MI	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
	- SMP/MTs	0,48	0,44	0,42	0,39	0,33
	- SMA/SMK/MA	1,01	0,94	0,83	0,84	0,39
4	Angka Melek Huruf (%)	87,36	88,08	88,44	97,09	97,1

Sumber : RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016

Realisasi capaian indikator Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan tren positif, yakni selalu mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada jenjang pendidikan SD/MI realisasi capaian indikator angka putus sekolah ditahun 2011 hingga tahun 2013

sebesar 0,04%, mengalami penurunan di tahun 2014 yakni 0,03% dan stagnan pada tahun 2015 pada prosentase 0.03%. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs realisasi capaian indikator angka putus sekolah di tahun 2011 sebesar 0,48%, mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 0,44%, tahun 2013 menjadi 0,42 % dan di tahun 2014 menjadi 0,39% dan 0.33% pada tahun 2015. Sedangkan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA menunjukkan realisasi capaian yang fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2011 prosentase APS sebesar 1,01% turun menjadi 0,94% di tahun 2012, kemudian turun lagi di tahun 2013 menjadi 0.83%, namun APS kembali naik menjadi 0.84% pada tahun 2014 dan kembali turun cukup signifikan menjadi 0,39% pada tahun 2015 (dalam <https://banyuwangikab.go.id/new/profil/profil-pendidikan.html>).

Berkat inovasi programnya ini, Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di kabupaten Banyuwangi mendapatkan berbagai apresiasi bergengsi dari berbagai pihak seperti:

1. Menjadi TOP 12 inovasi pelayanan publik terbaik provinsi Jawa Timur tahun 2016.
2. Masuk dalam jajaran 99 Inovasi Terbaik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).
3. Menjadi salah satu nominator "Millenium Development Goals Award" (MDGS) kategori bidang pendidikan dari pemerintah. MDGs (Sasaran Pembangunan Milenium) adalah program bersama seluruh dunia untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan pada 2015.

Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di Kabupaten Banyuwangi merupakan bentuk fenomena administrasi negara, sebab program adalah turunan dari sebuah kebijakan publik yang merupakan salah satu dimensi dalam administrasi negara. Program menurut Wahab (2008:28) adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Dalam konteks program

itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan/legislasi, pengorganisasian dan penyediaan sumber daya yang diperlukan, sedangkan menurut Arikunto dan Syafaruddin (2008:4) program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.

Evaluasi program sangat perlu dilakukan untuk menilai apakah suatu program telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, selain itu melalui hasil evaluasi program kita dapat menilai tingkat ketercapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan diawal program. Menurut Anggara (2018:271) evaluasi menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, yaitu dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Selain itu hasil evaluasi juga dapat dijadikan dasar menilai suatu kebijakan/program telah memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat/sasaran kebijakan. Secara normatif, fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih pada masa masyarakat yang semakin kritis menilai kinerja pemerintah.

Menurut Dunn (2003:610) terdapat beberapa tipe kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang meliputi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang dipilih dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui tingkat pencapaian tujuan antara program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di Kabupaten Banyuwangi. Mardiasmo (2009:132) mengatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan tingkatan yang menggambarkan derajat ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan di awal. Sehingga semakin banyak tujuan program yang tercapai maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya dan sebaliknya bila semakin sedikit tujuan program yang mampu tercapai maka dapat dikatakan tingkat efektivitasnya rendah.

Penelitian ini akan dilakukan di 2 sekolah dengan maksud untuk mengetahui perbedaan tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) sebab hingga penelitian ini dibuat setiap sekolah di Kabupaten Banyuwangi

memiliki cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan program Siswa Asuh Sebaya (SAS). Hasil penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa beberapa pengelola dari sekolah masih belum membaca dan memahami kebijakan yang telah dibuat pada program SAS seperti SK tentang SAS dan SOP SAS. Mereka melaksanakan program SAS sesuai instruksi kepala sekolah dan melakukan apa saja sesuai yang mereka ketahui dari mulut ke mulut tanpa membaca dan memahami isi dari kebijakan tersebut. Sehingga sekolah menjalankan program SAS secara formalitas saja tanpa mengetahui lebih jelasnya mengenai isi dan makna dari program SAS.

Kurangnya pemahaman pengelola SAS mengenai kebijakan program SAS membuat adanya perbedaan dalam pengelolaan terkait program SAS pada masing-masing sekolah dasar di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, faktor lain yang membuat adanya improvisasi yang berbeda-beda pada sekolah dasar dalam pengelolaan program SAS karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dinas setempat masih secara umum, belum memberikan penjelasan yang rinci mengenai pelaksanaan pengelolaan program SAS seperti tidak adanya juklak juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) program Siswa Asuh Sebaya (SAS). Hal tersebut membuat masing-masing sekolah memiliki caranya sendiri dalam mengelola program SAS (Rossalia, 2018:139).

Perbedaan pelaksanaan program ini dalam perspektif kebijakan publik menarik untuk diteliti sebab bila dikaitkan dengan teori perbandingan kebijakan, Parsons (2008:41) mengemukakan bahwa perbandingan kebijakan adalah studi tentang bagaimana dan mengapa pemerintah yang berbeda-beda melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dan apa efeknya. Berdasarkan teori tersebut peneliti menafsirkan bahwa melalui studi perbandingan kebijakan atau program, kita dapat mengkaji kelebihan atau kekurangan dari beberapa kebijakan/program sehingga berdasarkan hal tersebut kebijakan/program yang paling unggul dapat dijadikan acuan atau rekomendasi bagi pemerintah lain, atau jika dikaitkan dengan fenomena program SAS yang memiliki kemajemukan dalam pelaksanaannya diharapkan studi komparatif atau perbandingan ini dapat menemukan model

pelaksanaan program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang baik dan efektif sehingga bisa dijadikan rujukan dan diadopsi di sekolah-sekolah lain.

Penelitian ini dilakukan di 2 tempat yakni di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore karena tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perbandingan tingkat efektivitas program SAS di kedua SMA tersebut. Dua alasan yang mendasari peneliti menjadikan 2 SMA tersebut menjadi lokasi penelitian adalah.

*Pertama*, peneliti memiliki pandangan bahwa 2 SMA yang dijadikan lokasi penelitian tepat untuk merepresentasikan masyarakat modern (*refracted model*) dan masyarakat tradisional (*fused model*) yang memiliki kontras karakteristik terutama dalam hal tingkat solidaritas kelompok (kepedulian) menurut Freed W.Riggs. Alasan peneliti adalah karena 2 sekolah tersebut berada di lingkungan masyarakat yang mengadopsi nilai/kultur yang berbeda.

SMA Negeri 1 Glenmore dinilai tepat merepresentasikan masyarakat tradisional (*fused model*) karena berada di lingkungan masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai sosial/tradisional dalam kesehariannya, selain itu SMA ini juga kental dengan nilai-nilai religius karena berada di dalam lingkungan pondok pesantren, sehingga doktrin untuk saling membantu kepada semua orang sangatlah kuat (*Habluminannas*).

Sedangkan di sisi lain SMA Negeri 1 Giri dinilai tepat merepresentasikan masyarakat modern (*refracted model*) karena berada di lingkungan masyarakat yang mengadopsi nilai-nilai pasar dalam kesehariannya sehingga segala sesuatu yang dilakukan penuh dengan perhitungan laba dan rugi. Oleh karena itu tentu kegiatan-kegiatan sosial seperti halnya program SAS akan kurang diminati sehingga minim partisipasi dari para siswa.

Perbedaan dari kedua karakteristik masyarakat tersebut tentu menjadi kontras yang menarik untuk diperbandingkan dalam penelitian ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program Siswa Asuh Sebaya (SAS) merupakan program pengentasan kemiskinan melalui pemberian keringanan biaya pendidikan yang sumber dananya berasal dari donasi atau penggalangan dana secara sukarela dari para siswa di Sekolah, sehingga tingkat solidaritas dari para

siswa sangat menentukan keberhasilan atau tingkat efektivitas program ini. Semakin tinggi kepedulian siswa maka akan semakin banyak dana yang berhasil digalang sehingga akan semakin banyak juga siswa kurang mampu yang akan terbantu dalam program ini begitu pula sebaliknya.

Mekanisme pendanaan program SAS yang demikian tentu akan membuat kita berasumsi bahwa tingkat efektivitas program SAS di kedua sekolah tersebut akan berbeda. SMA Negeri 1 Glenmore akan memiliki tingkat efektivitas program SAS yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat efektivitas program SAS di SMA Negeri 1 Giri karena secara teori, SMA Negeri 1 Glenmore memiliki modal tingkat solidaritas siswa yang lebih kuat dalam melakukan penggalangan dana dibandingkan di SMA Negeri 1 Giri.

*Kedua*, pada penjelasan sebelumnya telah disinggung bahwa hingga saat penelitian ini dibuat setiap sekolah di Kabupaten Banyuwangi termasuk kedua sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini memiliki cara yang berbeda dalam melaksanakan program Siswa Asuh Sebaya (SAS) baik dari segi mekanisme penyelenggarannya maupun dari segi bentuk output program yang diberikan yang berikah kepada siswa penerima SAS.

Sebagai contoh jika ditinjau berdasarkan perspektif frekuensi distribusi bantuan, *Output* program SAS di SMA Negeri 1 Giri selalu diberikan di akhir semester sedangkan *output* program SAS di SMA Negeri 1 Glenmore diberikan setiap akhir bulan. Selain itu apabila ditinjau berdasarkan perpektif bentuk output yang diberikan, bentuk output program SAS di SMA Negeri 1 Giri berupa sepaket alat tulis, voucher potongan harga LKS, potongan uang gedung dan potongan SPP, Sedangkan bentuk output program SAS di SMA Negeri 1 Glenmore berupa uang tunai.

*Ouput* program merupakan produk/keluaran program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima program yang dalam konteks ini adalah siswa penerima bantuan SAS. *Output* program secara tidak langsung juga menggambarkan tingkat efektivitas suatu program. Apabila *output* program dapat dirasakan manfaatnya dan sesuai dengan harapan penerima program berarti tujuan program telah tercapai dengan kata lain program tersebut memiliki tingkat

efektivitas yang tinggi. Sebaliknya apabila penerima program tidak merasakan manfaat *output* program sesuai yang diharapkan berarti tujuan program tidak tercapai dengan kata lain program tersebut memiliki tingkat efektivitas yang rendah.

Kontras karakteristik masyarakat di lingkungan sekolah dan perbedaan bentuk output program SAS antara SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore membuka peluang besar terhadap munculnya perbedaan tingkat efektivitas program SAS, Sehingga 2 hal tersebut membuat fenomena ini menarik untuk diteliti untuk menemukan jawaban tentang ada tidaknya perbedaan tingkat efektivitas program SAS antara SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore di Kabupaten Banyuwangi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran atas target yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk membandingkan atau mengetahui perbedaan tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore di Kabupaten Banyuwangi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:21), manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1.4.1 Bagi Akademisi

hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pengetahuan baru kepada para akademisi terkait evaluasi dari fenomena program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang secara praktik implementasinya masih majemuk atau berbeda-beda sehingga diperlukan adanya studi perbandingan ini untuk mengetahui perbedaan tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore di Kabupaten Banyuwangi.

### 1.4.2 Bagi Pemerintah

Sekolah dengan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam penelitian ini perlu dipertimbangkan menjadi acuan/rujukan model pelaksanaan program SAS di sekolah-sekolah lain di Banyuwangi serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atau kajian bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk kemudian ditindaklanjuti dengan membuat juklak juklis secara rinci agar pelaksanaan program dapat dilakukan secara seragam.

### 1.4.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi bacaan yang mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman baru bagi pembaca atau masyarakat luas tentang perbandingan tingkat efektifitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore di Kabupaten Banyuwangi.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini berfokus pada perbandingan tingkat efektivitas program yang ditinjau dari segi output program, oleh karena itu dalam bab tinjauan pustaka ini akan membahas mengenai teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini. Penggunaan teori dan konsep tersebut untuk mempermudah peneliti dalam rangka melakukan serangkaian analisis atau kajian terhadap fenomena yang sedang diteliti. Selain hal tersebut bab ini juga akan memuat beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan dasar/referensi bacaan bagi peneliti untuk menyusun hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di bab sebelumnya.

Sebelum mengarah pada pembahasan tiap-tiap teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti mencoba memberikan alasan tentang pentingnya hubungan teori tersebut dan kedudukannya dalam penelitian ini, berikut penjelasannya.

### 1. Kebijakan Publik

Menurut Ryan Nugroho kebijakan publik senantiasa ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik dengan maksud untuk meningkatkan kualitas kehidupan publik tersebut. Sebenarnya bentuk-bentuk intervensi pemerintah terhadap kehidupan publik ini telah dimulai sejak tahun 1930-an ketika Keynes memperkenalkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi *economic malaise* yang dialami Amerika Serikat di tahun 1992. Kebijakan Keynes pada intinya adalah bahwa pemerintah harus melakukan intervensi-intervensi melalui kebijakan-kebijakan publik untuk menjaga kesinambungan kehidupan bersama.

Jika dahulu intervensi/kebijakan publik pada masa keynes hanya fokus terhadap permasalahan ekonomi, kini fokus kebijakan publik semakin luas dan sangat kompleks mengingat semakin berkembangnya

pula dinamika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga memerlukan penyelesaian atau jalan keluar dalam bentuk kebijakan publik yang tepat.

Permasalahan yang kini menjadi salah satu prioritas dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia adalah permasalahan pendidikan, sebab berdasarkan fakta di lapangan ternyata masih banyak anak usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan fasilitas pendidikan karena faktor ekonomi keluarga. Oleh karena itu berbagai daerah di Indonesia saling berlomba-lomba menciptakan kebijakan yang handal dan mampu mengatasi permasalahan ini, salah satunya pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mengimplementasikan program Siswa Asuh Sebaya (SAS).

Maka dari itu teori dan konsep kebijakan publik sangat diperlukan dalam penelitian ini sebab kebijakan publik berkedudukan sebagai teori/konsep yang menjadi dasar untuk memandang bahwa program Siswa Asuh Sebaya (SAS) merupakan sebuah terobosan produk kebijakan pemerintah setempat dalam rangka mengatasi permasalahan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

## 2. Evaluasi Kebijakan Publik

Beberapa ahli memandang bahwa evaluasi merupakan bagian atau tahapan terakhir dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk melakukan penilaian tentang keberhasilan suatu kebijakan, namun disisi yang berbeda terdapat pula beberapa ahli yang kurang sepakat bahwa evaluasi merupakan tahap akhir dalam siklus kebijakan. Para ahli tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang makna evaluasi, menurut mereka evaluasi bukan sekedar penilaian akhir dari suatu kebijakan namun lebih ke arah pemantauan atau monitoring kebijakan sehingga evaluasi kebijakan perlu dilakukan di setiap tahapan-tahap kebijakan.

Dalam konteks penelitian ini teori dan konsep evaluasi kebijakan sangat diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam rangka melakukan penilaian terhadap program Siswa Asuh Sebaya (SAS) melalui beberapa indikator atau kriteria evaluasi yang telah dirancang oleh para ahli. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada salah satu kriteria evaluasi yakni efektivitas.

### 3. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu dari sekian kriteria evaluasi yang disediakan oleh William Dunn. Efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dari suatu program. Penggunaan konsep ini akan mempermudah peneliti dalam melihat tingkat pencapaian dari tujuan atau target program SAS.

Jika program Siswa Asuh Sebaya (SAS) memiliki tingkat efektivitas yang tinggi berarti mayoritas tujuan atau target dari program Siswa Asuh Sebaya (SAS) telah tercapai, sebaliknya jika program Siswa Asuh Sebaya (SAS) memiliki tingkat efektivitas yang rendah berarti mayoritas tujuan atau target dari program Siswa Asuh Sebaya (SAS) belum tercapai

### 4. Program

Program merupakan rangkaian atau kelanjutan dari sebuah kebijakan. Program dilaksanakan untuk merealisasikan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, sebab manfaat atau nilai guna dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan mampu memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat karena masih berbentuk peraturan tertulis layaknya undang-undang dan sebagainya.

Siswa Asuh Sebaya (SAS) merupakan salah satu bentuk program dari kebijakan pendidikan pemerintah kabupaten Banyuwangi. Oleh sebab itu penelitian ini membutuhkan teori/konsep program sebagai pedoman peneliti untuk mengidentifikasi unsur-unsur atau kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam program Siswa Asuh Sebaya (SAS).

## 5. Teori Masyarakat Prismatik

Penggunaan teori masyarakat prismatic dirasa sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam membuat atau merancang hipotesis penelitian, sebab hipotesis penelitian akan diragukan apabila dirumuskan tanpa dasar dari sebuah teori. Peneliti menggunakan teori dari Riggs tentang masyarakat prismatic. Riggs membagi 3 jenis masyarakat yakni *fused model*, *prismatic model* dan *refracted model*. Namun, dalam penelitian ini peneliti membatasi fokus teori ini pada masyarakat tradisional (*fused model*) dan masyarakat modern (*refracted model*). Hal yang sangat kontras dari kedua jenis masyarakat tersebut menurut Riggs adalah tentang solidaritas kelompok, dimana dalam *fused model* tingkat solidaritas kelompoknya lebih kuat dibandingkan dengan *refracted model*.

Kaitan teori Riggs dengan penelitian ini adalah bahwa kemungkinan akan terjadi perbedaan dalam hal tingkat efektivitas program SAS antara SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore sebab kedua sekolah ini berasal dari dua ciri/karakteristik masyarakat yang berbeda, tepatnya berasal dari masyarakat modern (*refracted model*) dan masyarakat tradisional (*fused model*) yang memiliki kontras karakteristik dalam segi nilai-nilai sosial seperti halnya solidaritas kelompok, dimana solidaritas/kepedulian kelompok merupakan merupakan kunci dari efektivitas program SAS seperti yang telah disinggung sebelumnya pada bagian latar belakang penelitian.

## 6. Solidaritas Sosial

Teori solidaritas sosial dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan penjelasan tentang makna solidaritas sosial serta jenis-jenisnya yang berkembang di masyarakat. Hal ini diperlukan karena perbedaan jenis solidaritas sosial berpotensi memberi dampak yang berbeda terhadap efektivitas program SAS.

Setelah mengetahui alasan penggunaan teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, berikut penjelasan atau pembahasan dari masing-

masing teori, konsep, penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian yang telah dibuat.

## 2.1 Kebijakan Publik

### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Ryan Nugroho dalam bukunya yang berjudul “*kebijakan publik untuk negara-negara berkembang*” berusaha memberikan pemahaman tentang arti kata “kebijakan” dan “publik” sebelum memberikan definisi utuh tentang kebijakan publik. Menurut Nugroho (2014:47) kebijakan publik terdiri dari dua konsep dasar: kebijakan dan publik. Kebijakan adalah keputusan pemerintahan yang dibuat oleh seseorang yang memegang kekuasaan baik formal maupun informal, sedangkan publik adalah masyarakat umum, rakyat, atau pemegang saham. Publik adalah bagian dari tim yang sangat terkait dengan isu-isu khusus. Publik juga merupakan suatu lingkungan di mana orang-orang menjadi warga negara, suatu ruang dimana warga negara berinteraksi, dimana rakyat dan negara berada. Oleh karena itu kebijakan publik adalah keputusan Negara atau Pemerintah (sebagai pemegang kekuasaan) untuk *me-manage* kehidupan publik (sebagai lingkungan) agar dapat mencapai misi bangsa.

Pendapat yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Uddin dan Sobirin. Menurut Uddin dan Sobirin (2017:24) kebijakan publik dipandang sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Sehingga berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah sebagai bentuk usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah dikehendaki oleh masyarakat luas (publik).

Sedangkan Chochran (1999:1) dalam surya (2016:35) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah studi tentang tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik. Jika keputusan dan tindakan pemerintah dalam kebijakannya tidak memenuhi rasa keadilan, masyarakat dapat menolaknya. Penolakan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan penolakan

terhadap metodologi atau terhadap cara pandang yang digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Diantara beberapa pandangan para ahli mengenai definisi kebijakan, menurut peneliti definisi kebijakan menurut Thomas R.Dye dalam bukunya *“Understanding Public Policy”* adalah yang paling sederhana dan langsung merujuk pada inti pemaknaan kebijakan publik. Menurut Dye (1972:1) *“public policy is whatever governments choose to do or not to do”* yang apabila diterjemahkan artinya kebijakan publik adalah *“apa saja yang dipilih/ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”*. Penulis sangat setuju dengan pemilihan detail kata yang digunakan Thomas R.Dye untuk mendefinisikan kebijakan publik sebab tujuan kebijakan publik memang benar untuk mengatasi permasalahan-permasalahan publik namun dengan semakin banyaknya tuntutan dari masyarakat pemerintah harus bisa menggunakan skala prioritas artinya pemerintah harus bisa memilih dan memilih permasalahan mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dan permasalahan mana yang kurang begitu mendesak untuk diselesaikan sehingga penggunaan kata *“choose”* oleh Thomas R.Dye sangatlah tepat menurut peneliti.

Langkah pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang memprioritaskan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan membuktikan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan dibandingkan dengan mengatasi permasalahan lain, hal ini adalah bukti dari pengaplikasian teori Thomas R. Dye. Memberi prioritas anggaran untuk sektor pendidikan bukan tanpa alasan, sebab pendidikan merupakan sektor penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebab dengan bekal sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan mudah melakukan pembangunan di daerahnya.

Melalui alokasi dana di bidang pendidikan, pemerintah telah menghasilkan berbagai bentuk program (produk kebijakan) salah satunya adalah program Siswa Asuh Sebaya. Menurut peneliti program ini merupakan refleksi pernyataan *“not to do”* dari Thomas R. Dye karena dalam program ini pemerintah tidak secara langsung menjadi eksekutor dalam tahap implementasi program, akan tetapi

eksekutor implementasi program ini adalah pengurus SAS yang berasal dari kalangan siswa dan tugas pemerintah hanya memformulasikan dan memonitoring program ini,

### 2.1.2 Tahap-Tahap Penyusunan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:24) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan meliputi: Tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan tahap penilaian kebijakan.

#### a) Tahap penyusunan agenda

Kegiatan membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*) disebut dengan penyusunan agenda (*agenda setting*). Dengan demikian, *policy agenda* akan memuat masalah kebijakan yang perlu direspons oleh sistem politik yang bersumber dari lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan awal proses perumusan kebijakan publik diawali dengan kegiatan penyusunan agenda/agenda setting (Anggara, 2018: 121).

Anggara menambahkan bahwa penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah (*problems*) yang muncul di masyarakat. Masalah ini dapat diungkapkan oleh seseorang sebagai masalah pribadi (*private problem*). Masalah pribadi merupakan masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat langsung, kemudian berkembang lebih lanjut menjadi masalah publik (*public problem*). Masalah publik diartikan sebagai masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk akibat-akibat mengenai orang-orang yang terlibat secara tidak langsung.

Menurut Winarno (2016:87) terdapat beberapa faktor yang mendorong suatu masalah atau isu masuk ke dalam agenda publik yaitu.

1. Masalah/isu publik akan mencapai status agenda publik karena suatu krisis atau peristiwa yang kritis.
2. Terjadinya protes terhadap suatu permasalahan
3. Munculnya perhatian media massa terhadap suatu isu, karena dalam hal ini media massa berperan dalam menentukan peristiwa apa yang layak diberitakan dan mendapat penekanan lebih besar dibandingkan dengan peristiwa lain.

b) Tahap formulasi kebijakan

Anggara (2018:121) berpendapat bahwa tahap formulasi kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan secara ajeg dengan melibatkan para *stakeholder* (aktor) untuk menghasilkan serangkaian tindakan dalam memecahkan masalah publik melalui identifikasi dan analisis alternatif. Oleh karena itu, hal-hal yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang.

c) Tahap adopsi kebijakan

Tahap ini adopsi kebijakan sering juga disebut sebagai tahap rekomendasi kebijakan menurut William Dunn. Menurut Dunn (2003:27) rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan tentang manfaat atau biaya berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Hal ini membantu dalam pengambil kebijakan dalam tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenai eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Implementasi suatu kebijakan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Pengorganisasian tujuan-tujuan tersebut melalui peraturan perundang-undangan, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain implementasi suatu kebijakan berkaitan erat dengan faktor manusia, dengan berbagai latar belakang aspek sosial, budaya, politik dan sebagainya (Tahir, 2011:89)

e) Tahap penilaian kebijakan

Tahap penilaian kebijakan sering pula disebut sebagai tahap evaluasi kebijakan. Menurut Anggara (2018:271) evaluasi menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, yaitu dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Berdasarkan hasil evaluasi pula, dapat menilai sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif, fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih pada masa masyarakat yang semakin kritis menilai kinerja pemerintah.

Berdasarkan tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik yang telah dijelaskan sebelumnya. Topik dalam penelitian ini termasuk ke dalam tahap terakhir yakni tahap penilaian kebijakan atau tahap evaluasi kebijakan, karena jika melihat judul penelitian ini efektivitas merupakan salah satu dari sekian kriteria evaluasi versi William Dunn.

## 2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

### 2.2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya tujuan dari evaluasi kebijakan publik adalah untuk melihat sejauhmana program-program kebijakan yang telah dijalankan mampu menyelesaikan masalah-masalah publik. Menurut Winarno (2016:192) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Oleh karena itu evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan mulai dari tahap perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Ryan nugroho juga memiliki pandangan yang hampir serupa dengan Budi Winarno. Nugroho (2012:728) berpendapat evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”. Dalam konteks evaluasi beliau lebih memilih menggunakan kata pengendalian kebijakan. Menurutnya kebijakan publik lebih dipandang sebagai sebuah proses manajemen yang perlu dikendalikan disetiap prosesnya. Nugroho (2012:724) mengemukakan 3 dimensi dalam pengendalian kebijakan, yang meliputi.

1. Monitoring kebijakan atau pengawasan kebijakan

Pengawasan berupa pemantauan dengan penilaian untuk tujuan pengendalian pelaksanaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan seringkali dipahami sebagai “*on going evaluation*” atau “*formative evaluation*”

2. Evaluasi kebijakan

Merupakan penilaian pencapaian kinerja dari implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan “selesai dilaksanakan” dengan dua pengertian “selesai”, yaitu (1) pengertian waktu (mencapai/melewati

“tenggat waktu”) dan (2) pengertian (“pekerjaan tuntas”)

### 3. Pengganjaran kebijakan.

Pengganjaran merupakan pemberian insentif atau disinsentif yang ditetapkan dan diberikan sebagai hasil dari pengawasan dan penilaian yang telah dilakukan.

Menurut peneliti bahwa pada tahap pengganjaran ini merupakan tahap penentuan masa depan suatu kebijakan. Sebab apabila hasil evaluasi/penilaian dari kebijakan tersebut dinilai baik maka kebijakan tersebut akan tetap diimplementasikan dan sebaliknya apabila hasil evaluasi kebijakan tersebut dinilai buruk maka tentu akan ada tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut baik berupa revisi kebijakan atau penghentian kebijakan yang kemudian akan diganti dengan alternatif kebijakan baru.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dunn (2003:611) yang mengatakan bahwa evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Evaluasi kebijakan dimaknai sebagai sebuah bentuk pengendalian yang perlu dimonitor dan dievaluasi disetiap tahapnya maka evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut *timing* evaluasinya, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau sebagai evaluasi sumatif (Nugroho, 2012:730).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas kita dapat menarik kesimpulan tentang tujuan-tujuan mendasar dari evaluasi kebijakan publik. Menurut Anggara (2018:275-276) tujuan evaluasi meliputi.

- 1) Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan setelah adanya program tersebut. Mengukur efek menunjuk pada perlunya metodologi penelitian. Adapun membandingkan efek dengan tujuan

mengharuskan penggunaan kriteria untuk mengukur keberhasilan.

- 2) Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana.
- 3) Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan implementasi.
- 4) Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik/memenuhi akuntabilitas publik.

#### 2.2.2 Pendekatan Evaluasi

Menurut Dunn (2003: 613) terdapat 3 macam pendekatan dalam evaluasi kebijakan yakni.

##### a Evaluasi Semu

Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

##### b Evaluasi Formal

Evaluasi formal adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilihat atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan.

##### c Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan evaluasi formal. Hal tersebut dikarenakan peneliti

melakukan evaluasi berdasarkan tujuan program untuk melihat efektivitas program SAS antara SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore.

### 2.2.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:610) untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda-beda untuk mengevaluasi hasil kebijakan.

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi

<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar benar berguna?

*Sumber: Dunn (2003:610)*

Tipe kriteria evaluasi kebijakan publik meliputi.

#### 1. Efektivitas

Tipe kriteria efektivitas akan mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan/tujuan sebuah kebijakan publik telah dicapai atau belum? Jika hasil kebijakan telah tercapai maka kebijakan tersebut telah mencapai efektivitas begitu pula sebaliknya bila hasil kebijakan tidak tercapai maka kebijakan tersebut tidak mencapai tingkat efektivitas.

#### 2. Efisiensi

Tipe kriteria ini akan mempertanyakan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? Dengan kata lain apabila hasil/tujuan dari sebuah kebijakan mampu dicapai dengan

mengorbankan sedikit sumber daya misal waktu/biaya maka kebijakan tersebut dapat dinilai efisien, sebaliknya apabila sebuah kebijakan mengorbankan banyak sumber daya seperti waktu/biaya maka kebijakan tersebut dinilai tidak efisien.

### 3. Kecukupan

Tipe kriteria ini akan mempertanyakan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat? Tipe ini akan menjelaskan bahwa setiap hasil kebijakan yang diterima oleh sasaran program/kebijakan belum tentu sesuai atau solutif terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga belum bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul.

### 4. Perataan

Tipe kriteria ini akan mempertanyakan apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada sasaran program? Tipe ini akan lebih memfokuskan perhatiannya pada keadilan dalam pendistribusian hasil atau output kebijakan.

### 5. Responsivitas

Tipe kriteria ini akan mempertanyakan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Dalam kriteria ini akan dikaji kemungkinan-kemungkinan hasil kebijakan apakah hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu ? jika memang benar, perlu dilakukan revisi kebijakan atau bahkan menggantinya dengan alternatif kebijakan baru.

### 6. Ketepatan

Tipe kriteria ini akan mempertanyakan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? Kriteria ini akan menjelaskan seberapa penting tujuan kebijakan karena sering kali antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan memiliki perspektif yang berbeda terkait mendesak atau tidaknya (urgensi) suatu kebijakan.

Berdasarkan 6 tipe kriteria evaluasi yang disediakan oleh William Dunn, peneliti memilih kriteria efektivitas sebagai alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas/pencapaian tujuan dari program Siswa Asuh Sebaya di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore. Peneliti lebih memilih kriteria efektivitas dibandingkan dengan kriteria yang lain karena peneliti ingin melakukan evaluasi terhadap program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya.

## 2.3 Efektivitas

### 2.3.1 Pengertian Efektivitas

Rahman (2017:39) berpendapat bahwa efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Di sisi lain menurut Annas (2017:74) berpendapat bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang telah ditetapkan.

Sedangkan Mardiasmo (2009:132) menjelaskan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Sehingga pada dasarnya penekanan pada pengertian efektivitas berada pada pencapaian tujuan. Ini berarti suatu hal dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil tersebutlah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif (Rahman 2017:41).

Tingkat efektivitas suatu program dapat dinilai berdasarkan *output* program yang dihasilkan. Ketika program dinilai sudah efektif berarti *output* yang dihasilkan sudah mampu mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Mahmudi (2005:92) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Keterkaitan antara efektivitas dengan *output* juga dijelaskan oleh Irawati (2013) yang mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya kuantitas atau kualitas dari keluaran (*output*).

Oleh sebab itu, persepsi atau penilaian *output* program SAS dari para siswa penerima bantuan SAS akan dijadikan sebagai dasar pengukuran tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore. Jika di dalam hasil penelitian membuktikan bahwa *output* program SAS mendapatkan penilaian yang baik berdasarkan indikator pengukuran yang digunakan maka dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas program SAS dinilai tinggi, hal ini berlaku sebaliknya jika di dalam hasil penelitian membuktikan bahwa *output* program SAS mendapatkan penilaian yang buruk berdasarkan indikator pengukuran yang digunakan maka dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas program SAS dinilai rendah. Sehingga dengan demikian, peneliti akan mudah menilai sejauh mana program SAS ini mampu secara efektif membantu mengatasi permasalahan biaya pendidikan para siswa.

### 2.3.2 Indikator kualitas *Policy Output*

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa persepsi atau penilaian *output* program SAS dari para siswa penerima bantuan SAS akan dijadikan sebagai dasar pengukuran tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore karena secara teori *output* memiliki pengaruh atau kontribusi besar terhadap tingkat efektivitas suatu program. Seperti pendapat Mahmudi (2005:92) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar

kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut.

Pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat lain seperti Pendapat Irawati (2013) yang mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya kuantitas atau kualitas dari keluaran (*output*). Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa kualitas dari suatu *output* program memiliki pengaruh terhadap tingkat efektivitas suatu program. Sehingga jika *output* program yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik maka tingkat efektivitas program tersebut akan tinggi/baik dan sebaliknya jika *output* program yang dihasilkan memiliki kualitas yang buruk maka tingkat efektivitas program tersebut akan rendah/buruk. Karena kualitas *output* program berpengaruh terhadap efektivitas suatu program seperti menurut pendapat Irawati di atas, maka dalam penelitian ini indikator yang akan digunakan sebagai instrumen pengukuran adalah indikator kualitas *policy output*.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:105) menjelaskan bahwa indikator kualitas *policy output* dapat digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat dari adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan.

Purwanto dan Sulistyastuti menambahkan bahwa evaluator dapat merumuskan berbagai indikator untuk mengetahui kualitas *policy output* yang diterima oleh kelompok sasaran. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi *policy output* dari suatu kebijakan atau program yang akan dievaluasi;
2. Mengidentifikasi kelompok sasaran kebijakan atau program, apakah kelompok sasaran tersebut individu, keluarga, komunitas dan lain-lain;
3. Mengidentifikasi frekuensi kegiatan penyampaian *output* yang dilakukan oleh implementer;
4. Mengidentifikasi kualitas produk yang disampaikan oleh implementer kepada kelompok sasaran.

Secara umum apabila kebijakan atau program yang ingin dievaluasi tersebut merupakan kebijakan yang *distributif*, yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung melalui instrumen material seperti pelayanan gratis, subsidi, hibah, dan lain-lain seperti halnya dalam konsep program SAS. Maka Ripley dalam (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:106) mengungkapkan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas *policy output* diantaranya sebagai berikut.

1. Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Akses juga dapat diartikan terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individualnya atau dengan kata lain tidak terjadi diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

2. Cakupan

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.

3. Frekuensi

Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut.

#### 4. Bias

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak *eligible* untuk menikmati bantuan, hibah atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

#### 5. *Service delivery* (ketepatan layanan)

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut.

#### 6. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.

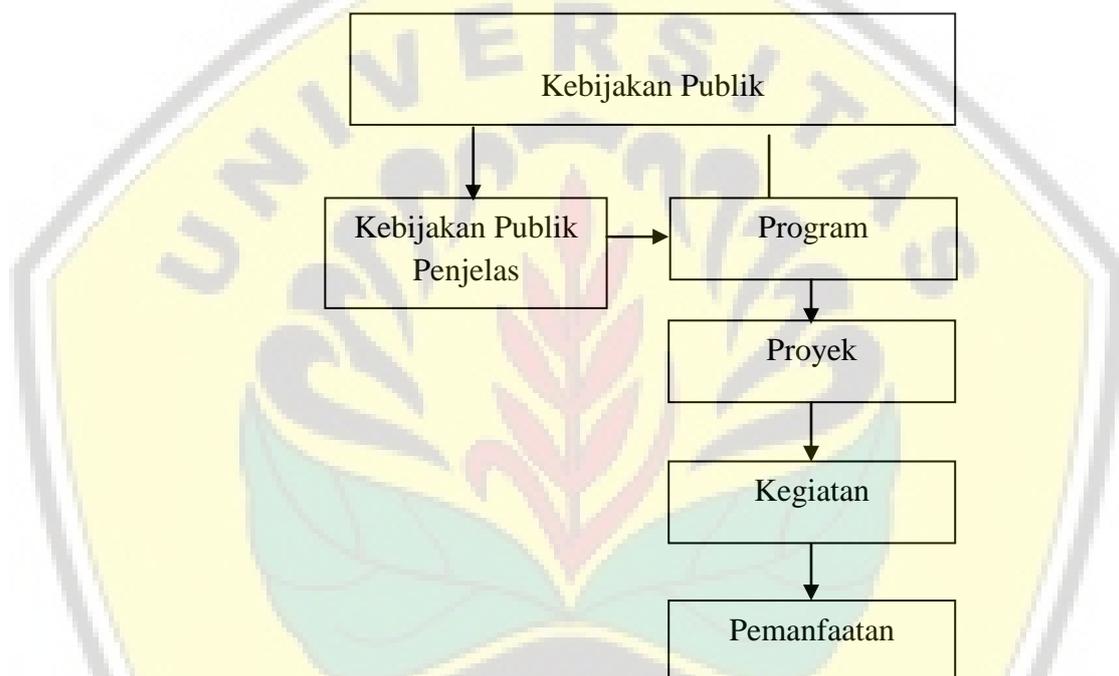
#### 7. Kesesuaian program dengan kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

## 2.4 Program

Riant Nugroho (2012:675) mengatakan bahwa program merupakan rangkaian atau kelanjutan dari sebuah kebijakan publik penjelas. Program dilaksanakan untuk merealisasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar sekuensi implementasi kebijakan publik sebagai berikut:

Gambar 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan Publik



*Sumber: Riant Nugroho( 2012:675)*

Gambar tersebut menjelaskan bahwa kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang/Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Rangkaian bentuk implementasi kebijakan dapat dilihat secara jelas dari kebijakan publik penjelas yang diturunkan dalam bentuk program serta diturunkan lagi dalam bentuk proyek dan kegiatan yang nantinya akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.

Program menurut Wahab (2008:28) adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Konteks program biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut

pengesahan/legislasi, pengorganisasian dan penyediaan sumber-sumber daya yang diperlukan. Menurut Arikunto dan Syafaruddin (2008:4) program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan. Menurut Syafaruddin (2008:86), terdapat dua langkah yang memungkinkan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa unsur penting dalam program di antaranya sebagai berikut.

- a) Implementasi atau realisasi dari suatu kebijakan.
- b) Instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.
- c) Berlangsung secara berkesinambungan.
- d) Program berlangsung dengan melibatkan sekelompok orang

Keempat unsur tersebut merupakan gambaran pelaksanaan program yang dimulai dengan realisasi kebijakan sampai dengan keterlibatan sekelompok orang dalam pelaksanaan suatu program.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep program tersebut kita dapat mengidentifikasi beberapa hal/unsur yang dapat dijadikan pedoman dalam menjelaskan mengenai gambaran program SAS beserta kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya.

*Pertama*, Program Siswa Asuh Sebaya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 24 tahun 2017 tentang Program Siswa Asuh Sebaya. Program ini merupakan salah satu realisasi program dari kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Implementasi program SAS merupakan wujud dari visi misi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 tentang visi pendidikan daerah yang berbunyi:

“Visi Pendidikan Daerah adalah Pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berkebangsaan, berwawasan global, dan terjangkau masyarakat”

Serta pasal 5 tentang maksud penyelenggaraan pendidikan yang berbunyi:

“Maksud penyelenggaraan pendidikan adalah mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas, menjamin perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.”

*Kedua*, sebagaimana termaktub dalam pasal 2 Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2017, tujuan program Siswa Asuh Sebaya (SAS) adalah sebagai wujud kepedulian masyarakat yang dilakukan oleh para siswa didik yang mampu secara ekonomi untuk membantu meringankan biaya pendidikan kepada sesama teman satu sekolah yang kurang mampu secara ekonomi.

*Ketiga*, dalam pelaksanaannya program Siswa Asuh Sebaya (SAS) dilaksanakan atau dikelola oleh pengurus SAS yang berasal dari para siswa atau pengurus OSIS di masing-masing sekolah. Pengurus SAS melakukan berbagai macam kegiatan dalam 1 periode kepengurusan seperti:

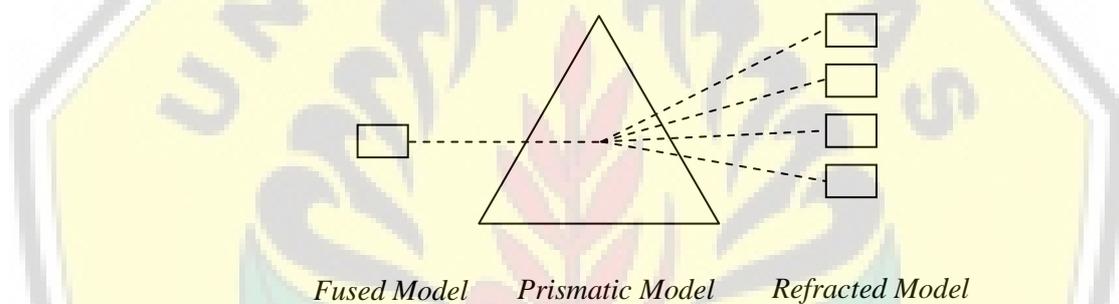
1. Sosialisasi dan pembukaan pendaftaran program SAS
2. Seleksi calon siswa penerima SAS yang dibantu oleh pembina SAS
3. Penetapan siswa penerima bantuan SAS
4. Penggalangan dana SAS setiap minggu atau bulan
5. Pelaporan hasil penggalangan dana kepada pembina SAS
6. Pendistribusian bantuan program SAS kepada siswa penerima SAS sesuai waktu yang dijadwalkan.

6 kegiatan tersebut merupakan gambaran kegiatan secara umum yang dilakukan oleh pengurus SAS dalam 1 periode kepengurusan (jabatan).

## 2.5 Teori Masyarakat Prismatik

Teori masyarakat prismatik sangat diperlukan dalam penelitian karena menjadi dasar teori dalam pembuatan hipotesis penelitian. Menurut Fred W. Riggs dalam Tri Kadarwati (1995:5.27) masyarakat prismatik merupakan suatu model yang menjelaskan secara tegas masyarakat campuran antara model yang “*fused*” yang prosesnya digunakan untuk mempelajari masyarakat-masyarakat yang tradisional atau primitif dan model “*refracted*” yang digunakan untuk melakukan analisis tentang pemerintahan dalam masyarakat yang sudah berkembang dalam perindistribusian.

Gambar 2.2 Ilustrasi Model Masyarakat Prismatik Menurut Riggs



Sumber: Gambar olahan peneliti (2019)

Gambar dari ilustrasi model masyarakat prismatik tersebut dapat dimaknai bahwa menurut Riggs, *fused model* merupakan model yang digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang masih tradisional, sedangkan *refracted model* merupakan model yang menggambarkan kondisi masyarakat modern atau maju yang sudah mengenal spesialisasi tugas. Selain kedua model tersebut terdapat model prismatik yang digunakan Riggs untuk menggambarkan kondisi masyarakat campuran atau persilangan antara masyarakat tradisional (*fused model*) dan masyarakat modern (*refracted model*), namun dalam penelitian ini peneliti membatasi fokus teori ini pada masyarakat modern (*refracted model*) dan masyarakat tradisional (*fused model*) karena kedua model masyarakat ini yang secara kontras dan tegas memiliki perbedaan ciri/karakteristik, tidak seperti masyarakat prismatik yang ciri/karakteristiknya merupakan perpaduan dari 2 model masyarakat tersebut.

Riggs mencoba menjelaskan mengenai perbedaan antara ciri/karakteristik masyarakat tradisional (*fused model*) dengan masyarakat modern (*refracted model*). Riggs dalam (Ekustyana, 2017) mengemukakan bahwa pada masyarakat modern (*refracted model*), harga ditentukan oleh faktor pasar (penawaran dan permintaan), sedangkan pada masyarakat tradisional (*fused model*), harga ditentukan oleh faktor lain (disebutnya sebagai arena) yang menentukan keseimbangan kekuasaan, *prestise* dan solidaritas.

Secara tidak langsung kesimpulan yang kita dapat berdasarkan pendapat Riggs di atas adalah bahwa masyarakat modern (*refracted model*) memiliki tingkat solidaritas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat tradisional (*fused model*) karena dalam kesehariannya mereka mengadopsi nilai-nilai pasar (*profit oriented*) sehingga segala sesuatu yang dilakukan penuh dengan perhitungan laba dan rugi. Oleh karena itu mereka tentu kurang memiliki minat terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang kurang membawa manfaat secara *financial* bagi mereka.

Sebaliknya, masyarakat tradisional (*fused model*) memiliki tingkat solidaritas lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat modern (*refracted model*) karena hubungan kekeluargaan dan nilai-nilai sosial masih terjaga dan sangat dipegang teguh oleh masyarakat tradisional sehingga cara gotong royong dan saling membantu sering dilakukan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Munculnya perbedaan ini tentu akan mempengaruhi tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) mengingat mekanisme pendanaan program ini berasal dari solidaritas para siswa yang diwujudkan dalam bentuk penggalangan dana. Logikanya jika semakin tinggi tingkat solidaritas siswa maka dana SAS yang berhasil digalang akan semakin besar sehingga semakin banyak siswa kurang mampu yang dapat dibantu, dengan demikian maka program SAS dapat dinilai efektif. Sebaliknya, semakin rendah tingkat solidaritas siswa maka dana SAS yang berhasil digalang akan semakin kecil sehingga semakin sedikit siswa kurang mampu yang dapat dibantu, dengan demikian program SAS dapat dinilai tidak efektif.

## 2.6 Solidaritas Sosial

Hasan Alwi (2005:1082) mengatakan bahwa solidaritas adalah sifat (perasaan) solider, sifat satu arah (senasib), perasaan setia kawan antara sesama anggota sangat diperlukan. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2009:104) menjelaskan bahwa solidaritas sosial merupakan kesetiakawanan yang menunjukan pada satu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.

Emile Durkheim dalam Setiyawati (2014) membagi klasifikasi kelompok yang didasarkan pada solidaritas sosial yaitu suatu keadaan dimana hubungan antara individu atau kelompok berdasarkan perasaan dan kepercayaan yang dianut bersama dan kemudian diperkuat dengan adanya pengalaman emosional pada suatu masyarakat tersebut. Oleh Durkheim, rasa solidaritas ini diklasifikasikan ke dalam suatu kelompok yang sifatnya sederhana (pedesaan) dan kelompok masyarakat yang sifatnya kompleks (perkotaan). Durkheim melakukan analisa terhadap ikatan-ikatan sosial antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern. Ia menyimpulkan bahwa ikatan sosial yang ada pada masyarakat primitif berdasarkan kesamaan moral dan memiliki tingkat kesadaran kolektif yang tinggi, ia menyebutnya sebagai solidaritas mekanis. Sedangkan pada masyarakat modern ikatan kolektifitasnya relatif rendah dan adanya pembagian kerja yang ketat, Durkheim menyebutnya sebagai solidaritas organis.

### 1. Solidaritas Mekanik

Menurut Durkheim bahwa, Seluruh warga masyarakat pada solidaritas mekanis diikat oleh apa yang dinamakan "*collective conscience*" yaitu suatu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan dan perasaan kelompok yang sifatnya memaksa".

Maka pada kelompok masyarakat ini terbentuk suatu kesadaran bersama, norma-norma sebagai pedoman hidupnya, dan menjunjung tinggi adat-istiadatnya dan oleh sebab itu terdapat suatu sanksi bagi para

pelanggarnya. Solidaritas mekanik ini terdapat pada masyarakat pedesaan yang masih sederhana.

Oleh Durkheim, penekanan terhadap klasifikasi kelompok ini adalah bahwa solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan pola normatif yang sama diantara masyarakatnya. Oleh sebab itu masyarakat primitif memiliki tingkat kolektifitas yang kuat terhadap pemahaman norma dan kepercayaan bersama, sehingga didalamnya bersifat rigid dan religius.

## 2. Solidaritas Organik

Solidaritas organis merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks yaitu masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian dan kesepakatan-kesepakatan antara berbagai kelompok profesi.

Pada kelompok masyarakat ini tingkat kesadaran kolektif sangat lemah, kemarahan kolektif yang timbul akibat adanya penyimpangan dimungkinkan sangat kecil sehingga sanksi terhadap pelanggaran hukum hanya sebatas mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan (restitutive). Yang termasuk pada pengklasifikasian jenis solidaritas organis adalah masyarakat perkotaan.

Berdasarkan teori Durkheim tersebut kita memperoleh sebuah kesimpulan bahwa teori Durkheim tentang solidaritas sosial berkesinambungan dengan teori Freed W. Riggs tentang masyarakat prismatic dimana dari pernyataan kedua ahli tersebut merujuk pada suatu kesimpulan bahwa masyarakat tradisional/pedesaan memiliki ikatan sosial, kesamaan moral dan tingkat kesadaran kolektif yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat modern/perkotaan.

Hal ini dikarenakan masyarakat pedesaan memiliki bentuk solidaritas mekanik yang cenderung menggunakan norma-norma sosial/adat sebagai pedoman hidupnya, berbeda dengan masyarakat perkotaan yang sikap solidaritasnya muncul dikarenakan adanya ketergantungan diantara setiap bagian/posisi dalam sebuah sistem kerja.

Jika teori Durkeim ini digunakan untuk melihat fenomena program SAS yang mekanisme implementasinya didasarkan pada kepedulian para siswa maka akan memunculkan gab/kesenjangan sosial antara sekolah implementor SAS yang terletak di desa dan kota yang tentunya akan berdampak pada perbedaan tingkat efektivitas program SAS. Munculnya gab/kesenjangan sosial tersebut tentunya dipengaruhi oleh perbedaan bentuk solidaritas sosial masyarakat yang berkembang di sekitar lingkungan sekolah.



## 2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang efektivitas program bahkan terdapat pula penelitian terdahulu yang meneliti tentang program Siswa Asuh Sebaya (SAS) dalam konteks evaluasi kebijakan publik. Berikut merupakan 5 penelitian terdahulu yang menjadi pedoman/referensi bagi peneliti dalam melakukan proses penelitian.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Nama	Winda Rosalia	Saras Setyawati
Perguruan Tinggi	Universitas Jember	IAIN Purwokerto
Tahun penelitian	2018	2018
Judul Penelitian	Evaluasi program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi	Efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud no. 12 tahun 2015 tentang program indonesia pintar)
Metode penelitian	Deskriptif Kualitatif	Deskriptif Kuantitatif
Persamaan	Menggunakan teori evaluasi kebijakan	Menggunakan konsep efektivitas untuk mengevaluasi program
Perbedaan	Menggunakan semua kriteria dalam evaluasi kebijakan seperti efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan yang dianalisis secara deskriptif.	Menggunakan konsep kebijakan pendidikan dan di dalam bab pembahasan masing-masing indikator dianalisis secara kuantitatif menggunakan deskriptif persentase.
Hasil penelitian	Program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi masih belum mampu menjalankan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam SK dan SOP tentang Program	Efektifitas program Kartu Indonesia Pintar bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap lebih dari 70%. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata sebesar 92,10 yang lebih besar dari 78,4 dan hasil uji t yang memiliki signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05

	SAS karena sosialisasi yang tidak merata sehingga masing-masing sekolah membuat improvisasi sendiri terkait pengelolaan SAS.
Keterangan	Penelitian ini berkontribusi besar bagi peneliti karena memberikan informasi yang kompleks terkait program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di Kabupaten Banyuwangi Melalui penelitian ini, peneliti mendapatkan pemahaman baru tentang cara menilai tingkat efektivitas suatu program berdasarkan perpektif kuantitatif

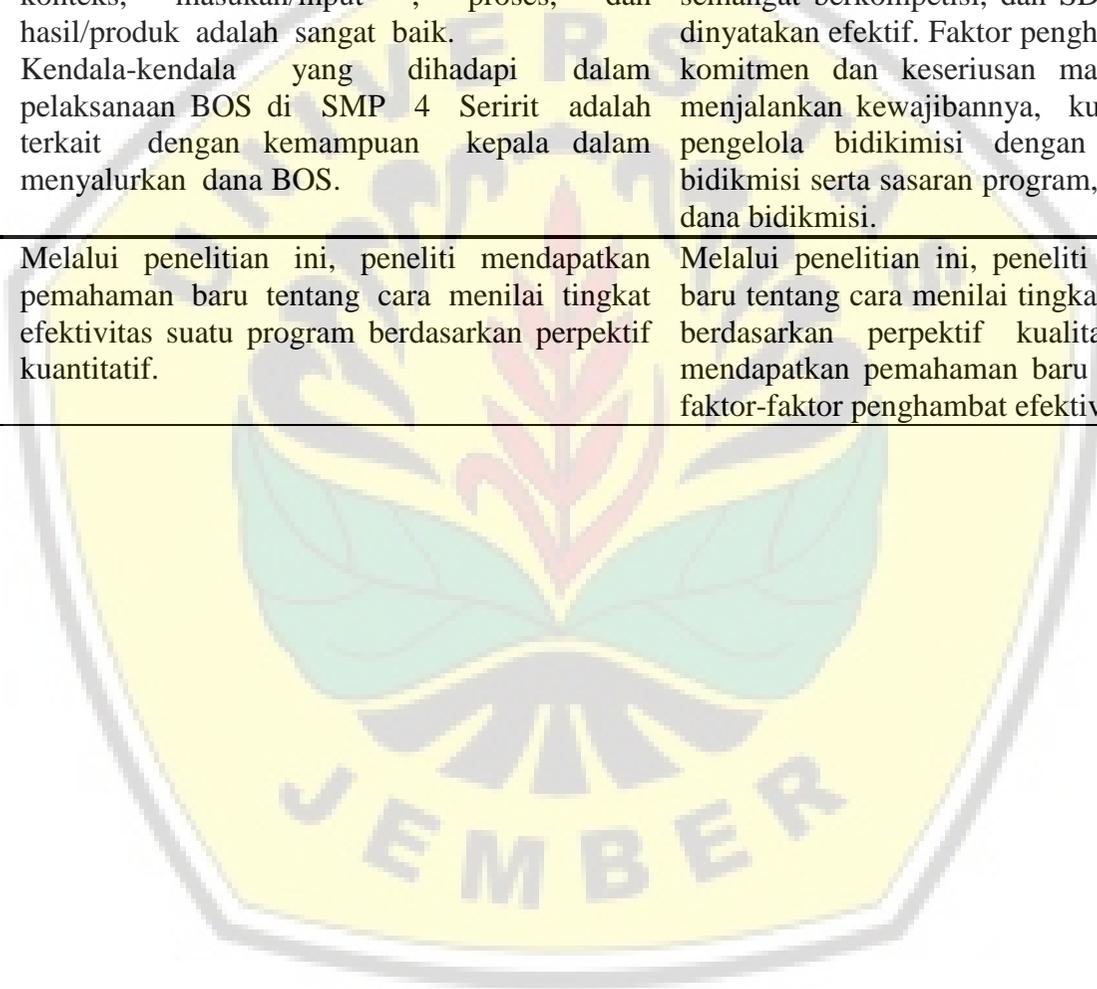
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Nama	Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana, Agus Baskoro SB Anak Agung Gede Agung
Perguruan Tinggi	Universitas Pendidikan Ganesha Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun penelitian	2015 2016
Judul Penelitian	Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng Efektivitas Program Bidik Misi di Universitas Negeri Yogyakarta
Metode penelitian	Deskriptif Kuantitatif Deskriptif Kualitatif
Persamaan	Menggunakan konsep efektivitas untuk mengevaluasi program Menggunakan teori evaluasi kebijakan dan konsep efektivitas
Perbedaan	Indikator efektivitas dianalisis berdasarkan transformasi T Score dalam bentuk kode min (-) dan plus (+) yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kuadran Glickman. Tiap-tiap indikator efektivitas program yang telah ditentukan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif yang sumber datanya berasal dari hasil wawancara peneliti.

---

Hasil penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas program BOS di SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng ditinjau dari komponen konteks, masukan/input, proses, dan hasil/produk adalah sangat baik. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BOS di SMP 4 Seririt adalah terkait dengan kemampuan kepala dalam menyalurkan dana BOS.	Efektivitas program bidikmisi di UNY dilihat berdasarkan ketercapaian tujuan bidikmisi yaitu: Pemerataan akses pendidikan, lulus tepat waktu, meningkatkan prestasi dan semangat berkompetisi, dan SDM berkualitas yang sudah dinyatakan efektif. Faktor penghambat yang muncul adalah komitmen dan keseriusan mahasiswa bidikmisi dalam menjalankan kewajibannya, kurangnya koordinasi antara pengelola bidikmisi dengan sekolah asal penerima bidikmisi serta sasaran program, Keterlamabatan pencairan dana bidikmisi.
Keterangan	Melalui penelitian ini, peneliti mendapatkan pemahaman baru tentang cara menilai tingkat efektivitas suatu program berdasarkan perpektif kuantitatif.	Melalui penelitian ini, peneliti mendapatkan pemahaman baru tentang cara menilai tingkat efektivitas suatu program berdasarkan perpektif kualitatif serta peneliti juga mendapatkan pemahaman baru tentang cara menganalisis faktor-faktor penghambat efektivitas suatu program

---



Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

Nama	Nike Irawati
Perguruan Tinggi	Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tahun penelitian	2013
Judul Penelitian	Hubungan Kualitas Pegawai Dengan Efektivitas Organisasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Dearah Provinsi Kepulauan Riau
Metode penelitian	Kuantitatif Asosiatif
Persamaan	Menggunakan konsep efektivitas dan pendekatan kuantitatif
Perbedaan	Lokus dari konsep efektivitas terletak pada organisasi sedangkan penelitian yang sedang diteliti terletak pada program
Hasil penelitian	Terdapat hubungan antara kualitas pegawai terhadap efektifitas organisasi Biro humas walaupun hubungan tersebut pada kategori sedang.
Keterangan	Berdasarkan penelitian ini, peneliti memiliki pemahaman baru bahwa kuantitas atau kualitas output sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas. Sehingga teori ataupun pendapat tersebut bisa dijadikan dasar bagi peneliti yang ingin menilai efektivitas suatu program berdasarkan perspektif output yang dihasilkan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini menggunakan 2 sampel sehingga penelitian ini tergolong jenis penelitian perbandingan (komparatif) apabila ditinjau dari tujuan penelitiannya dan hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang masih menggunakan 1 sampel terutama pada jenis penelitian kuantitatif.

### 2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sugiyono (2017:99) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- $H_a$  : Terdapat perbedaan signifikan tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore di Kabupaten Banyuwangi.
- $H_0$  : Tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore di Kabupaten Banyuwangi.

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (2014:2) merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data yang dilakukan karena adanya tujuan serta kegunaan tertentu. Oleh karena itu metode penelitian secara umum merupakan cara atau aturan yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan untuk mencari, menganalisis, sampai dengan menginterpretasikan data. Berdasarkan definisi di atas maka metode penelitian memiliki karakteristik pokok yaitu bersifat ilmiah. Cara ilmiah tersebut harus memiliki sifat rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya penelitian yang dilakukan harus dengan cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh akal manusia. Empiris artinya cara yang dilakukan untuk kegiatan penelitian dapat diamati secara nyata oleh indera manusia. Sifat sistematis artinya penelitian yang dilakukan mengikuti langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

#### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2014:35) merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sedangkan apabila ditinjau berdasarkan tujuan penelitiannya maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian komparatif. Penelitian komparatif menurut Sugiyono (2014:54) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda.

## **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian merupakan tempat peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Kegiatan penelitian ini dilakukan di 2 tempat penelitian yakni di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Dua hal yang menjadikan sekolah tersebut sebagai tempat penelitian yakni *pertama*, cukup merepresentasikan model masyarakat modern dan tradisional ditinjau dari letak geografisnya. *Kedua*, memiliki perbedaan bentuk output program SAS.

### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian merupakan waktu yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yakni mulai tanggal 1 Mei – 1 Juni 2019.

## **3.3 Populasi dan Sampel Penelitian**

### **3.3.1 Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan dari unit yang diteliti. Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Agung dkk, 2016:66). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa penerima bantuan program Siswa Asuh Sebaya di SMA Negeri 1 Giri sebanyak 34 siswa dan seluruh siswa penerima bantuan program Siswa Asuh Sebaya di SMA Negeri 1 Glenmore sebanyak 9 siswa, sehingga total populasi dalam penelitian ini berjumlah 43 siswa.

### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Erwan dkk, 2017:37), sedangkan menurut Sugiyono (2014:81) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Oleh karena itu sampel yang digunakan dalam suatu penelitian harus representatif atau dapat mencerminkan keadaan populasi.

Terdapat 2 metode penarikan sampel dari populasi: pemilihan sampel probabilitas (*probability sampling*) dan pemilihan sampel tak probabilitas (*non-probability sampling*). *probability sampling* merupakan metode yang memberikan kesempatan yang sama, bebas, dan seimbang bagi elemen dalam populasi yang didefinisikan untuk terpilih menjadi sampel penelitian, sedangkan dalam metode *non probability sampling*, elemen dalam populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi subjek dalam sampel (Silalahi, 2010). Penelitian ini akan menggunakan metode penarikan sampel dengan cara *non probability sampling*,

Sedangkan untuk menentukan besaran atau ukuran jumlah sampel yang akan digunakan, peneliti akan menggunakan teknik sensus atau sampling jenuh. Sampling jenuh/sensus merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang (Machli, 2018:227).

Di sisi lain, menurut Arikunto (2010:112) pengambilan sampel untuk penelitian jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan pernyataan tersebut maka peneliti mengambil 100% jumlah populasi yang ada di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore yakni sebanyak 43 orang responden.

### **3.4 Variabel Penelitian**

#### **3.4.1 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual sering juga disebut sebagai definis teoritis, definisi rasional, definisi konstitutif, definisi konotatif dan definisi nominal. Definisi konseptual atau teoritis dapat diartikan sebagai definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain (Silalahi, 2010: 118). Definisi konseptual dalam penelitian ini akan memberikan definisi konsep tentang efektivitas dan program Siswa Asuh Sebaya.

Mahmudi (2005:92) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Keterkaitan antara efektivitas dengan output juga dijelaskan oleh Irawati (2013) yang mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya kuantitas atau kualitas dari keluaran (*output*).

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa kualitas dari suatu *output* program memiliki pengaruh terhadap tingkat efektivitas suatu program. Sehingga jika *output* program yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik maka tingkat efektivitas program tersebut akan tinggi/baik dan sebaliknya jika *output* program yang dihasilkan memiliki kualitas yang buruk maka tingkat efektivitas program tersebut akan rendah/buruk.

Berdasarkan 2 pendapat tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa output berpengaruh terhadap efektivitas suatu program, oleh karena itu maka penilaian output dari para siswa penerima bantuan SAS akan dijadikan dasar dalam melakukan pengukuran tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore.

Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) adalah program bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Bantuan yang diberikan bersumber dari hasil penggalangan dana para siswa yang berlatarbelakang ekonomi mampu. Program SAS telah dicanangkan sejak tahun 2011 namun pemerintah baru mengesahkan program tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/182/KEP/429.011/2014 tentang Program Siswa Asuh Sebaya. Selanjutnya dalam rangka mengatur sistematis pelaksanaan program SAS secara lebih rinci maka Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Standar Operasional Prosedur yang tercantum dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/1416/429.101/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Siswa Asuh Sebaya di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

### 3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional menurut Kuncoro (2013:171) merupakan suatu aturan yang telah dijelaskan secara rinci pemetaan dan alat dimana variabel akan diukur dalam kenyataan. Oleh karena itu definisi operasional sangat dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan pengukuran dalam penelitian. Penelitian ini terdiri dari satu variabel yakni efektivitas program.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa persepsi atau penilaian output program SAS dari para siswa penerima bantuan SAS akan dijadikan sebagai dasar pengukuran tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore karena secara teori output memiliki pengaruh atau kontribusi besar terhadap tingkat efektivitas suatu program. Pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat lain seperti pendapat Irawati (2013) yang mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya kuantitas atau kualitas dari keluaran (*output*). Dengan demikian dalam penelitian ini indikator yang akan digunakan sebagai instrumen pengukuran adalah indikator kualitas *policy output*. Ripley dalam (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:106) mengungkapkan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas *policy output* diantaranya sebagai berikut.

#### 1. Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Akses juga dapat diartikan terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individualnya atau dengan kata lain tidak terjadi diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

Jika melihat berdasarkan perspektif fenomena maka indikator akses akan menghasilkan jawaban yang mendeskripsikan tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pengurus SAS selama berlangsungnya program ini. Hal-hal yang akan dipertanyakan di dalam kuesioner yakni seputar kemudahan penerima SAS dalam mendapatkan informasi yang bersumber dari pengurus SAS, kemudahan mekanisme program SAS, kemudahan dalam memberi pengaduan apabila terjadi masalah serta kemudahan akses/kesetaraan kesempatan bagi seluruh siswa penerima penerima program SAS.

Akses menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti di dalam penelitian ini sebab akses merupakan langkah awal dalam program ini yang akan memberikan kesan baik buruknya kinerja pengurus di dalam program SAS. Ketika pengurus SAS mendapatkan kesan yang kurang baik di awal program tentunya hal ini akan berdampak pada tingkat efektivitas program ini. Misalkan, ketika pengurus SAS kurang terbuka dalam memberikan informasi kepada sasaran program dan cenderung berbelit-belit dalam menentukan mekanisme pendaftaran calon siswa penerima bantuan SAS, tentunya calon sasaran program akan enggan untuk mengikuti/berpartisipasi dalam program ini akibatnya cakupan sasaran program tidak bisa maksimal dan banyak siswa kurang mampu yang terlantar dan tidak dapat terbantu dalam program ini.

## 2. Cakupan

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana, dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.

Jika melihat berdasarkan perspektif fenomena maka indikator cakupan akan menghasilkan jawaban yang mendeskripsikan penilaian sasaran program (siswa penerima program SAS) terhadap efektivitas

program Siswa Asuh Sebaya (SAS) jika dilihat berdasarkan banyak sedikitnya siswa kurang mampu yang telah terbantu oleh program ini. Asumsinya jika sasaran program menilai bahwa seluruh siswa kurang mampu telah tercakup/terbantu dalam program ini maka program SAS ini dapat dikatakan efektif atau berhasil dalam mencapai tujuannya karena banyak siswa kurang mampu yang dapat terbantu dalam program ini, sebaliknya jika sasaran program menilai bahwa masih terdapat siswa kurang mampu yang belum tercakup/terbantu dalam program ini maka program SAS dapat dinilai belum efektif karena belum menjangkau seluruh siswa-siswi kurang mampu sesuai dengan tujuan utama program.

### 3. Frekuensi

Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut.

Jika melihat berdasarkan perspektif fenomena maka indikator frekuensi akan menghasilkan jawaban yang mendeskripsikan tentang intensitas atau seberapa sering sasaran program (siswapenerima SAS) mendapatkan bantuan program SAS. Intensitas dalam ruang lingkup indikator ini terbagi atas 2 macam yakni intensitas dalam kurun waktu satu periode program SAS (1 semester) dan intensitas jangka panjang (berkelanjutan dari tahun ke tahun). peneliti merasa bahwa hal ini perlu diukur, sebab peneliti memiliki asumsi bahwa semakin sering bantuan SAS diberikan kepada sasaran program dalam satu kurun waktu tertentu maka akan semakin efektif program ini karena dampak dan manfaat yang diterima oleh sasaran program akan semakin besar, sebaliknya semakin minim/jarang bantuan SAS diberikan kepada sasaran program dalam satu kurun waktu tertentu maka akan semakin kurang efektif program ini karena dampak dan manfaat yang diterima oleh sasaran program akan semakin kecil. Hal ini berkaca pada teori yang telah disampaikan di bab

sebelumnya bahwa suatu program dapat dikatakan efektif ketika manfaatnya telah mampu diterima oleh sasaran program. Sehingga menurut penulis pemberian bantuan SAS dengan intensitas/frekuensi yang tinggi merupakan langkah agar sasaran program dapat benar-benar mampu merasakan manfaat dari diimplementasikannya suatu program.

#### 4. Bias

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak *eligible* untuk menikmati bantuan, hibah atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

Jika melihat berdasarkan perspektif fenomena maka indikator bias akan menghasilkan jawaban yang secara tidak langsung akan mengcross check tentang ada tidaknya pembiasan dalam penentuan penerima program, sebab di awal observasi penelitian ini ditemukan sejumlah pengakuan dari penerima program bahwa terdapat siswa yang berasal dari kategori keluarga mampu namun tetap mendapatkan program SAS. Semakin banyak jawaban positif dari penerima program di dalam kuesioner maka semakin besar indikasi terjadinya pembiasan sasaran program yang ditetapkan oleh pengurus SAS. Begitupun sebaliknya semakin banyak jawaban negatif dari penerima program di dalam kuesioner maka semakin kecil indikasi terjadinya pembiasan sasaran program yang ditetapkan oleh pengurus SAS.

Selain mengukur pembiasan yang terjadi dari segi sasaran program, melalui indikator ini peneliti juga mencoba mencari jawaban tentang sejauhmana penerima program mampu menggunakan bantuan SAS yang diberikan di setiap bulan secara tepat atau bijaksana. Hal ini untuk memberi kepastian bahwa bantuan SAS yang diberikan benar-benar digunakan untuk memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan atau

biaya siswa selama bersekolah dan bukan untuk hal-hal lain yang menyimpang dari tujuan utama program ini.

5. *Service delivery* (ketepatan layanan)

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya keterlambatan dalam implementasi program tersebut akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut.

Jika melihat berdasarkan perspektif fenomena maka indikator *service delivery* akan menghasilkan jawaban yang mendeskripsikan tentang sejauhmana pengurus SAS konsisten dalam mendistribusikan bantuan dengan tepat waktu. Namun pendistribusian bantuan SAS di waktu yang tepat juga tidak kalah pentingnya, sebab distribusi bantuan di waktu yang tepat akan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar membawa manfaat bagi sasaran program (siswa penerima bantuan SAS). Misal, sasaran program mungkin akan lebih bisa merasakan manfaat bantuan SAS apabila pendistribusian bantuan SAS dilakukan di awal semester dan tidak di akhir semester sebab biasanya di awal semester pengeluaran orang tua lebih besar jika dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Oleh karena itu, menurut peneliti melakukan cross check kesesuaian antara waktu yang diharapkan dengan waktu yang ditetapkan pengurus SAS dalam pendistribusian bantuan SAS menjadi sangat penting untuk menilai seberapa puas sasaran program terhadap *timing* distribusi bantuan SAS.

## 6. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.

Jika melihat berdasarkan perspektif fenomena maka indikator akuntabilitas akan menghasilkan jawaban yang mendeskripsikan tentang sejauhmana pengurus SAS dapat mempertanggungjawabkan segala realisasi dari komitmen/janji yang telah disepakati bersama penerima program di awal program. Aspek yang diukur dalam indikator ini berkaitan dengan transparansi laporan keuangan pengurus SAS kepada warga sekolah dan hal-hal yang berkaitan keadilan/kesetaraan untuk memberi kepastian bahwa tidak terjadi diskriminasi atau pengurangan hak dalam pendistribusian bantuan SAS diantara sasaran program.

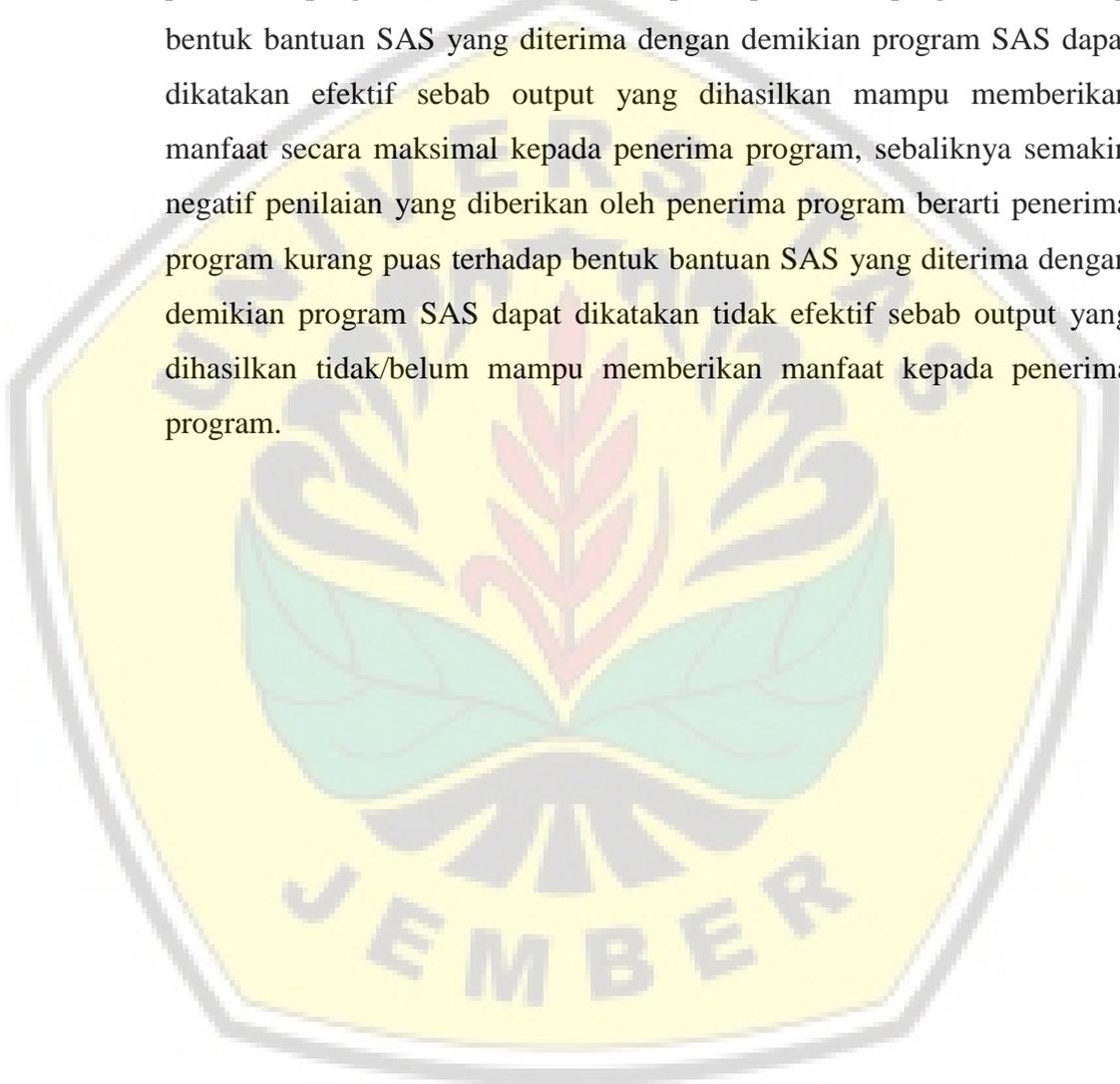
## 7. Kesesuaian program dengan kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

Jika melihat berdasarkan perspektif fenomena maka indikator kesesuaian program dengan tujuan akan menghasilkan jawaban yang akan mengcross check apakah bentuk dari bantuan SAS yang diberikan sesuai dengan tujuan sekaligus harapan penerima program. Cross check ini perlu dilakukan karena tidak menutup kemungkinan bahwa selama program SAS berlangsung, bentuk output program yang ditetapkan dan didistribusikan oleh pengurus SAS tidak sesuai dengan kebutuhan bahkan

harapan dari penerima program. Akibatnya, sasaran program tidak mampu merasakan manfaat yang seharusnya didapatkan dari adanya output program.

Sehingga asumsinya semakin positif penilaian yang diberikan oleh penerima program berarti semakin puas penerima program terhadap bentuk bantuan SAS yang diterima dengan demikian program SAS dapat dikatakan efektif sebab output yang dihasilkan mampu memberikan manfaat secara maksimal kepada penerima program, sebaliknya semakin negatif penilaian yang diberikan oleh penerima program berarti penerima program kurang puas terhadap bentuk bantuan SAS yang diterima dengan demikian program SAS dapat dikatakan tidak efektif sebab output yang dihasilkan tidak/belum mampu memberikan manfaat kepada penerima program.



**Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen penelitian efektivitas program**

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Butir
Efektivitas	1. Akses	1. Keterbukaan informasi	1
		2. Kemudahan mekanisme pendaftaran program SAS	2
		3. Kemudahan syarat pendaftaran program SAS	3
		4. Kesempatan akses yang sama bagi calon/siswa penerima SAS	4
		5. Memfasilitasi saran/pengaduan	5
	2. Cakupan	1. Cakupan target sasaran penerima program SAS	6
		2. Besaran persentase target grup yang menerima program SAS	7
	3. Frekuensi	1. Intensitas waktu distribusi bantuan	8,9,10
	4. Bias	1. Ketepatan pemanfaatan bantuan SAS	11
		2. Ada atau tidaknya penerima bantuan program SAS diluar kriteria	12
	5. Service delivery	1. Konsistensi pendistribusian bantuan sesuai mekanisme yang disepakati	13
		2. Waktu distribusi bantuan sesuai harapan penerima program	14
	6. Akuntabilitas	1. Transparansi hasil penggalangan dana	15
		2. Keadilan distribusi bantuan	16
		Kesesuaian bentuk bantuan dengan komitmen di awal program	17
	7. Kesesuaian program dengan kebutuhan	1. Manfaat bantuan sesuai tujuan program	18
		2. Nilai manfaat program sesuai kebutuhan penerima bantuan	19
		3. Bantuan SAS memberikan motivasi belajar	20

Sumber: Penulis (2019)

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena akan menentukan kualitas hasil penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Menurut Silalahi (2010:289) terdapat 2 macam sumber data dalam sebuah penelitian yakni.

#### 1. Sumber primer

Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut "*first-hand information*". Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer. Data atau sumber data primer antara lain meliputi dokumen historis dan legal, hasil dari suatu eksperimen, data statistik, lembaran-lembaran penulisan kreatif, dan objek-objek seni.

Data primer pada penelitian ini bersumber dari kuesioner penelitian yang telah dijawab oleh 43 responden penelitian yang berasal dari seluruh siswa penerima bantuan program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

#### Sumber sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi *original*.

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal, skripsi/penelitian terdahulu, artikel, berita, dan data-data pendukung lainnya yang mendukung/membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini atau sekedar menjadi informasi tambahan yang berguna dalam penelitian ini.

### 3.6 Skala Pengukuran

#### 3.6.1 Skala Likert

Skala pengukuran merupakan sebuah kesepakatan yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan panjang pendeknya jarak pada alat ukur. Sedangkan Skala *likert* merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi seseorang atau suatu kelompok terhadap suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2014:93).

Dalam penggunaan skala *likert*, variabel yang akan diukur akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang berbentuk kata-kata seperti: Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya:

Tabel 3.2 Skoring item dalam Skala Likert

No.	Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Kurang Setuju	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Penulis (2019)

#### 3.6.2 Transformasi Data

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2017:63) Jenis data yang dihasilkan kuesioner dengan menggunakan skala likert memiliki skala data ordinal. Oleh sebab itu penulis perlu melakukan transformasi data dari bentuk ordinal ke bentuk interval sebab syarat dari skala data yang harus terpenuhi sebelum melakukan analisis *Independent sample t-test* adalah jenis data penelitian yang memiliki skala interval.

Penelitian ini akan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI). Sarwono dan Budiono (2012:343) menjelaskan bahwa *Method of Successive Interval* (MSI) merupakan proses mengubah data ordinal menjadi data interval. Data ordinal harus diubah ke bentuk interval karena dalam banyak prosedur statistik seperti *Regresi*, *Korelasi Pearson*, uji *t* dan lain sebagainya mengharuskan data berskala interval. Oleh karena itu, jika data penelitian masih berskala ordinal, maka data tersebut harus diubah kedalam bentuk interval untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur tersebut.

Sarwono dan Budiono (2012:352) menambahkan bahwa transformasi data merupakan hal yang penting sebab jika data ordinal atau nominal digunakan dalam prosedur yang mengharuskan data berskala interval maka justru akan mengecilkan koefisien korelasi. Akibatnya model yang dibuat peneliti salah dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diharuskan dalam *model fit*.

Sarwono dan Budiono (2012:344) menjelaskan langkah-langkah transformasi data dari bentuk data ordinal ke bentuk data interval sebagai berikut.

a. Menghitung frekuensi

Frekuensi merupakan banyaknya tanggapan responden dalam memilih skala ordinal 1 – 5.

b. Menghitung proporsi (P)

Proporsi dihitung dengan membagi setiap frekuensi dengan jumlah responden.

c. Menghitung proporsi kumulatif (PK)

Proporsi kumulatif dihitung dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap nilai.

d. Mencari nilai Z

Nilai Z diperoleh dari tabel distribusi normal baku (*critical value of z*) dengan asumsi bahwa proporsi kumulatif berdistribusi normal baku.

e. Menghitung Densitas (Z)

Nilai F (z) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{Exp} \left( \frac{1}{2} Z^2 \right)$$

Namun dalam penelitian ini, transformasi data dari bentuk data ordinal ke bentuk data interval tidak dilakukan secara manual seperti langkah-langkah diatas, melainkan melalui bantuan *microsoft Add-Ins Stat 97.xla* pada Microsoft Excel 2007 agar proses transformasi data lebih efektif dan efisien.

### 3.7 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kuantitatif terdapat beberapa metode pengumpulan data seperti: metode angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi (Bungin, 2013:130).

#### 1. Angket

Metode ini juga disebut sebagai metode kuesioner atau dalam bahasa inggris *questionnaire* (daftar pertanyaan). Metode angket berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian angket diberikan kepada responden untuk diisi/dijawab. Setelah itu angket yang telah terjawab dikumpulkan kembali untuk kemudian diproses berdasarkan prosedur statistik yang digunakan. Responden penelitian ini berjumlah 43 responden yang berasal dari seluruh siswa penerima bantuan program SAS di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore.

#### 2. Wawancara

Metode wawancara juga bisa disebut dengan metode *interview*. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan siswa penerima bantuan SAS dan pengurus SAS di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mencari informasi awal seputar pelaksanaan program SAS. Pada praktiknya peneliti mengkombinasikan metode wawancara ini dengan metode observasi.

### 3. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pancaindra. Proses observasi ini merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena terkadang apa yang disampaikan oleh responden tidak sama dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan sebagai sarana pengumpulan data melalui pengamatan pelaksanaan program SAS di lapangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa metode observasi ini dalam praktiknya dikombinasikan dengan metode wawancara.

### 4. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya. Terdapat berbagai macam data yang diperoleh dari metode ini seperti data tentang sejarah sekolah, profil sekolah, SOP program SAS dan lain sebagainya.

## 3.8 Uji Instrumen Penelitian

### 3.8.1 Uji Validitas

*Validitas* atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2014:46). Uji *validitas* dalam sebuah penelitian kuantitatif bertujuan menguji *valid* atau tidaknya suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan *valid* apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (sesuai) atau dengan kata lain *valid* menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Sebelum penelitian kuantitatif dilakukan, peneliti wajib melakukan uji *validitas* terhadap instrumen penelitian (kuesioner) yang telah dibuat sebelum kuesioner tersebut disebar kepada responden atau sampel penelitian. Masing-masing item pertanyaan yang termuat dalam kuesioner akan diuji tingkat validitasnya. Item-item pertanyaan yang dinyatakan *valid* akan dimuat di dalam kuesioner penelitian sedangkan item-

item pertanyaan yang tidak *valid* dalam pengujian ini tidak akan dicantumkan dalam kuesioner penelitian.

Uji *validitas* yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi *product moment* dengan rumus :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = koefisien korelasi *product moment*

X = skor butir

Y = jumlah skor yang diuji

n = banyaknya sampel

Menurut Siregar (2014:48) ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui kuesioner yang digunakan sudah tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur, yaitu:

1. Jika koefisien korelasi *product moment* melebihi 0,5.
2. Jika koefisien korelasi *product moment* > r-tabel ( $\alpha$  ; n-2) n = jumlah sampel
3. Nilai Sig  $\leq \alpha$

Namun dalam penelitian ini, uji *validitas* setiap item pertanyaan dalam kuesioner penelitian tidak akan dilakukan secara manual seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas melainkan peneliti akan menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistic 22 agar proses penghitungan lebih efektif dan efisien.

### 3.8.2 Uji Reliabilitas

*Reliabilitas* adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula (Siregar, 2014:55). Salah satu teknik untuk mengukur *reliabilitas* suatu instrumen penelitian adalah menggunakan teknik *alpha cronbach*. Menurut Siregar (2014:57) teknik *alpha cronbach* dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian *reliabel* atau tidak.

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan *reliable* dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas ( $r_{11}$ ) > 0,6. Tahapan perhitungan uji *reliabilitas* dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*, yaitu:

- a. Menentukan nilai varians setiap butir pertanyaan

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}}{n}$$

- b. Menentukan nilai varians total

$$\sigma_t^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n}$$

- c. Menentukan *reliabilitas* instrumen

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1}\right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2}\right)$$

Keterangan :

- n : Jumlah sampel  
 $X_i$  : Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan  
 $\sum X$  : Total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan  
 $\sigma_t^2$  : Varians total  
 $\sum \sigma_b^2$  : Jumlah varians butir  
k : Jumlah butir pertanyaan  
 $r_{11}$  : Jumlah varians butir

Namun dalam penelitian ini, uji *reliabilitas* setiap item pertanyaan dalam kuesioner penelitian tidak akan dilakukan secara manual seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas melainkan peneliti akan menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistic 22 agar proses penghitungan lebih efektif dan efisien.

### 3.9 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah proses transformasi atau menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Menurut Silalahi (2010:321) proses transformasi data dilakukan melalui kegiatan penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), dan tabulasi (*tabulation*). Berikut penjelasan dari tiap-tiap tahapan tersebut:

1. Tahap penyuntingan (*editing*)

Proses memeriksa kembali kualitas data dalam instrumen dinamakan penyuntingan (*editing*). Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi kelengkapan, konsistensi, ketepatan, keseragaman, dan relevansi. Jika data yang didapat menunjukkan ada cacat yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya satu atau beberapa syarat data maka harus dilakukan pengumpulan data ulang ke lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan.

2. Tahap pengkodean (*koding*)

Pengkodean adalah satu proses pengklasifikasian tanggapan atau jawaban menjadi kategori yang lebih bermakna. Mengkode berarti memberi angka pada tiap kategori jawaban (*response category*) sehingga tiap jawaban yang telah disusun dalam suatu kategori tertentu memiliki kode tersendiri berupa angka. Kategori lebih bermakna jika untuk tiap kategori dari tiap jawaban diberi dalam bentuk simbol (biasanya angka).

3. Tahap pembeberan (*tabulating*)

Tabulasi adalah tahap yang menyajikan hitungan frekuensi atau perkiraan numerik tentang distribusi dari suatu hal. Oleh karena itu, tabulasi merupakan alat analisis atau sebagai alat untuk menyusun kategori ketika mengubah variabel rasio atau interval menjadi nominal atau ordinal

atau berdasarkan indeks. Tabulasi kemudian digunakan untuk menciptakan statistik deskriptif. Data yang ditabulasi dan dianalisis adalah data yang sudah tersusun sedemikian rupa dalam bentuk tabel induk. Dengan kata lain, setelah data disusun dalam tabel induk atau matrik data barulah kegiatan tabulasi dengan mudah dapat dilakukan.

### 3.10 Uji Prasyarat Analisis Data

Uji prasyarat analisis data merupakan serangkaian uji yang wajib dilakukan sebelum melakukan teknik analisis data menggunakan uji *Independent sampel t test*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya data tersebut bila dianalisis menggunakan uji *Independent sample t-test*. Uji prasyarat data tersebut adalah uji normalitas dan uji homogenitas.

#### 3.10.1 Uji Normalitas

Uji *Normalitas* merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data. Uji *Normalitas* dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji *Normalitas* data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah data yang berdistribusi normal (Sarjono dan Julianita, 2011:45).

Siregar (2014:427) menjelaskan bahwa prosedur perhitungan sampel besar uji *Kolmogorov smirnov* secara garis besar hampir sama dengan perhitungan sampel kecil, hanya saja berbeda pada penentuan nilai  $D_{tabel}$ . Apabila sampel kecil nilai  $D_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel *Kolmogorov Smirnov* namun pada sampel besar seperti jumlah sampel dalam penelitian ini dimana  $n_1 n_2 > 40$  maka diperlukan perhitungan menggunakan rumus.

Berikut merupakan rumus *Kolmogorov smirnov* menurut Siregar dengan taraf signifikansi 0,05.

$$D_{hitung(0,05)} = 1,36 \frac{\sqrt{n_1 + n_2}}{n_1 n_2}$$

Keterangan :

$n_1$  = Sampel pertama

$n_2$  = Sampel kedua

$\alpha$  = Taraf Signifikansi

Menurut Santoso (2018:192) apabila nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal sedangkan apabila nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi normal. Perhitungan uji normalitas dalam penelitian ini tidak akan dilakukan secara manual melainkan melalui bantuan software IBM SPSS Statistic 22 agar proses penghitungan lebih efektif dan efisien.

### 3.10.2 Uji *Homogenitas*

Uji *Homogenitas* merupakan uji untuk memberikan informasi bahwa data penelitian masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang tidak berbeda jauh keragamannya (Ismail, 2018:201). Menurut Kadir dalam (Ismail, 2018:201) bahwa homogenitas data mempunyai makna bahwa data memiliki variasi atau keragaman nilai sama atau secara statistik sama. Hasil uji homogenitas yang baik apabila hasil uji tersebut memiliki nilai simpangan estimasi mendekati angka 0 (nol).

Uji ini dilakukan sebagai salah satu syarat uji statistik parametrik diantaranya seperti uji t yang akan digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan Levene Statistic pada menu SPSS 22 untuk menguji tingkat homogenitas kedua data penelitian.

Pedoman pengambilan keputusan dalam Levene Statistic menurut Santoso (2018:192) yakni:

1. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0,05$ , data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians tidak sama
2. Nilai Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0,05$ , data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varians sama.

### 3.11 Teknik Analisis Data

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketika data penelitian telah memenuhi persyaratan dalam uji prasyarat analisis data maka data dapat dilanjutkan ke tahap analisis data. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *Independent sample t-test*.

Purwanto dan Sulistyastuti (2017:157) mengatakan bahwa uji *Independent sample t-test* bertujuan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata (arithmetic mean) dari dua kelompok sampel independen atau saling bebas memiliki perbedaan secara signifikan. Menurut Sugiyono (2017:258) Pengujian hipotesis untuk jenis penelitian *komparatif* dengan 2 sampel *Independent* dapat dilakukan dengan menggunakan rumus *t-test pooled varian* dengan derajat kebebasannya ( $dk$ ) =  $n_1 + n_2 - 2$  dengan syarat apabila jumlah sampel ( $n$ )  $n_1 \neq n_2$  dan varian homogen ( $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ).

Siregar (178:2014) menjelaskan bahwa prosedur uji statistik dua sampel *independent* meliputi.

a) Membuat hipotesis dalam uraian kalimat

$H_a$  : Terdapat perbedaan signifikan tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore di Kabupaten Banyuwangi.

$H_0$  : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

b) Membuat hipotesis model statistik

$H_0 : \mu_a \neq \mu_b$

$H_a : \mu_a = \mu_b$

c) Menentukan tingkat signifikansi

Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$

d) Menggunakan uji yang akan digunakan

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t dua sampel *independent* menggunakan rumus *pooled varians* karena jenis datanya interval, kedua sampel tidak saling berhubungan dan jumlah  $n_1 \neq n_2$ .

e) Kaidah pengujian

➤ Jika,  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

➤ Jika,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

f) Menghitung  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$

➤ Tahapan menentukan nilai  $t_{hitung}$

1. Membuat tabel penolong

Responden	( $X_1$ )	( $X_2$ )	( $X_1 - X_1$ ) <sup>2</sup>	( $X_1 - X_2$ ) <sup>2</sup>
1	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
N	.....	.....	.....	.....
Jumlah	$\sum = \dots$	$\sum = \dots$	$\sum = \dots$	$\sum = \dots$

2. Menghitung nilai rata-rata pengukuran kelompok ke...i

Rumus:

$$X_i = \frac{\sum X_1}{n}$$

3. Menghitung nilai varians kelompok ke...i

$$S_i^2 = \sum \frac{(X_i - X_i)^2}{n_i - 1}$$

4. Menghitung nilai  $t_{hitung}$

$$t_{hitung} = \frac{X_1 - X_2}{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$$

Keterangan:

$X_i$ : Data pengukuran kelompok ke i.

$X_i$ : Nilai rata-rata data pengukuran kelompok ke i.

$n_i$ : Jumlah responden kelompok ke i.

$S_1^2$ : Nilai varians kelompok ke i.

➤ Menghitung  $t_{table}$

Dengan taraf signifikan  $\alpha = 0,05$ . Kemudian dicari  $t_{\text{tabel}}$  pada tabel distribusi - t dengan ketentuan:  $db = n-2$ .

- g) Membandingkan  $t_{\text{hitung}}$  dan  $t_{\text{tabel}}$
- h) Membuat keputusan

Namun dalam penelitian ini, teknik analisis data dengan menggunakan *uji t-test pooled varians* tidak akan dilakukan secara manual seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas melainkan peneliti akan menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistic 22 agar proses penghitungan lebih efektif dan efisien.



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Pada sub bab ini akan dijabarkan secara ringkas butir-butir kesimpulan yang diperoleh setelah pada bab sebelumnya dilakukan serangkaian prosedur statistik, pengujian hipotesis serta pembahasan. Berikut merupakan butir-butir kesimpulan yang telah diperoleh diantaranya:

1. Hasil analisis data dengan menggunakan teknik independent sampel t test menyatakan bahwa  $t_{hitung}$  sebesar -699 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.682. Artinya, nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-699 < 1.682$ ) sehingga keputusan dalam uji hipotesis penelitian ini adalah hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di SMAN 1 Giri dan SMAN 1 Glenmore.
2. Secara umum pelaksanaan program SAS di kedua sekolah memiliki sejumlah perbedaan apabila dilihat berdasarkan mekanisme penyelenggaraan, bentuk output program SAS dan perbandingan mean di setiap indikator penelitian.
3. Indikator service delivery merupakan indikator yang memiliki selisih mean terbesar yakni sebesar 1,11 Hal tersebut mengisyaratkan bahwa terjadi perbedaan terkait ketepatan waktu dalam pemberian bantuan SAS antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore, walaupun perbedaan yang terjadi tidak signifikan.
4. Indikator akuntabilitas merupakan indikator yang memiliki selisih mean sebesar 0 (nol). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa dari segi akuntabilitas, tidak ditemukan perbedaan pelaksanaan program SAS antara SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore.

## 5.2 Saran

Tidak terdapatnya petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang secara terperinci mengatur standar kualitas atau bentuk output program SAS yang hendak disalurkan kepada siswa kurang mampu merupakan masalah yang melatarbelakangi penelitian ini dibuat sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait perbandingan tingkat efektivitas program SAS di sekolah yang memiliki output program SAS berbeda.

Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di SMAN 1 Giri dan SMAN 1 Glenmore. Walaupun hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terjadi perbedaan tingkat efektivitas program SAS di kedua sekolah tersebut. Peneliti berharap dan memberikan saran bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk dapat segera membuat peraturan yang secara lebih rinci yang mengatur tentang standar kualitas atau bentuk output program SAS agar program SAS di Kabupaten Banyuwangi dapat diimplementasikan secara seragam dan manfaat output program dapat lebih efektif dirasakan oleh para siswa penerima bantuan program SAS.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Ali Gunawan, Muhammad. 2015. *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi, dan Sosial*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Anas, A. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebes Medis Perkasa.
- Anggara, Sahya. 2018. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Pratek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- B. Sore, Uddin dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasan Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ismail, Fajri. 2018. *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kadarwati, Tri. 1995. *Administrasi Negara Perbandingan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?) Edisi 4*. Jakarta : Erlangga

- Machli, Imam. 2018. *Statistik Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Prodi Manajemen Pendidikan Islam.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nugroho, Ryan. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nugroho, Ryan. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parson, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Permana, Surya. 2016. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif: untuk Administrasi Publik Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahman, Mariati. 2017. *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV. Sah Media.
- R.Dye, Thomas. 2008. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education.
- Santoso, Singgih. 2018. *SPSS 22 From Essential to Expert Skills*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sarwono, Jonathan dan Budiono, Herlina. 2012. *Statistik Terapan: Aplikasi Untuk Riset Skripsi, Tesis dan Desertasi (Menggunakan SPSS, AMOS dan Excel)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar*:

- Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Syofian. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi (Metode R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik & Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta pusat: PT. Pustaka Indonsia Press.
- Wibowo dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Jember University Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Widhi, Agung dan Zarah. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses dan Studi Komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

### **Jurnal**

Arizona, M. M. (2012). Kajian Tentang Siswa Putus Sekolah Pada Tingkat SMA/SMK Di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik).

Ashiong P. Munthe. (2015). Disampaikan dalam Workshop untuk Mahasiswa tentang Penelitian Metode Kuantitatif dan Kualitatif di Fakultas Ilmu Pendidikan UPH, Karawaci, 16 dan 23 Juni 2015., 1–14.

Basrowi dan Siti Juariyah. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Marringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7(April), 58–81.

Ekustyana. (2017). Administrasi publik dalam perspektif ekologi. *FISIP UIN Sunan Gunung Jati*, 7, 11.

Irawati, N. (2013). Hubungan Kualitas Pegawai Dengan Efektivitas Organisasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. *Naskah Publikasi*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Ratna. Dewi, Made. Yudana, Agung.Gede. (2015). Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng, 6(1).

### **Skripsi**

Baskoro, Agus. 2016. Efektivitas Program Bidik Misi di Universitas Negeri Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Rossalia, Winda. 2018. Evaluasi Program Siswa Asuh Sebaya Pada Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Banyuwangi. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.

Setyawati, Saras. 2018. Efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 tahun 2015 tentang program indonesia pintar).*Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Setiyawati, Rima.2014. Peranan Dukun Bayi Dalam Perspektif Masyarakat Jawa Terhadap Proses Persalinan Di Dusun Nolopriyani Desa Jatirejo Kabupaten Semarang Jawa Tengah (Melalui Pendekatan Teori Solidaritas Mekanik dan Organik Emile Durkheim).*Skripsi*. Jakarta. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.

### Internet

Banyuwangi. Profil Pendidikan.

<https://banyuwangikab.go.id/new/profil/profil-pendidikan.html>

[Diakses pada 27 Oktober 2018]

JPIP. Karena Risau Seragam Luluh Tanpa APBD, Siswa Selamatkan 100 Ribu Temannya dari Putus Sekolah

<http://www.jpip.or.id/artikelview-635.html>

[Diakses pada 5 November 2018]

Kompas. 2017. Kenaikan Gaji Lebih Kecil dari Kenaikan Biaya Pendidikan Solusinya.

<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/07/17/084700526/kenaikan-gaji-lebih-kecil-dari-kenaikan-biaya-pendidikan-solusinya->

[Diakses pada 3 Desember 2018]

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2016. Program Siswa Asuh Sebaya Banyuwangi Raih Penghargaan Kompetisi Pelayanan Publik.

<https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/program-siswa-asuh-sebaya-banyuwangi-raih-penghargaan-kompetisi-pelayanan-publik.html>

[Diakses tanggal 5 november 2018]

Tempo. 2016. RAPBN 2017 Lima Sektor Prioritas Pemerintahan Jokowi.

<https://bisnis.tempo.co/read/796572/rapbn-2017-lima-sektor-prioritas-pemerintahan-jokowi>

[Diakses tanggal 5 november 2018]

SMAN 1 Giri. Profil Sekolah

*Sumber:*<http://sman1giri.siapsekolah.com/sekolahprofil/#.XMhfqh4xc0M>

[Diakses tanggal 15 April 2019 ]

SMAN 1 Glenmore. Profil Sekolah

<http://smanegeri1glenmore.siap-sekolah.com/sekolahprofil/#.XMv5uh4xc0M>

[Diakses tanggal 15 April 2019]

Student CNN Indonesia. Tingginya Angka Putus Sekolah di Indonesia

<https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/>

[Diakses pada 29 Oktober 2018]

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016

<https://banyuwangi.kab.go.id>

[Diakses pada 29 Oktober 2018]

### **Peraturan**

Keputusan kepala dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/1416/429.101/2015. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Siswa Asuh Sebaya (SAS) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi*. 21 April 2015. Banyuwangi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta

Peraturan Bupati No.24 tahun 2017. *Program Siswa Asuh Sebaya*. 18 Mei 2017. Banyuwangi

Peraturan Kabupaten Banyuwangi No.5 tahun 2011. *Sistem Penyelenggaraan Pendidikan*. 15 Juni 2011. Banyuwangi

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Ali Gunawan, Muhammad. 2015. *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi, dan Sosial*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Anas, A. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebes Medis Perkasa.
- Anggara, Sahya. 2018. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Pratek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- B. Sore, Uddin dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasan Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hidayat, R. 2017. Political Devolution: Lessons From a Decentralized Mode of Government in Indonesia. *SAGE Open* 7 (1): 2158244016686812.
- Ismail, Fajri. 2018. *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kadarwati, Tri. 1995. *Administrasi Negara Perbandingan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?) Edisi 4*. Jakarta : Erlangga

- Machli, Imam. 2018. *Statistik Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Prodi Manajemen Pendidikan Islam.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nugroho, Ryan. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nugroho, Ryan. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parson, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Permana, Surya. 2016. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif: untuk Administrasi Publik Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahman, Mariati. 2017. *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV. Sah Media.
- R.Dye, Thomas. 2008. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education.
- Santoso, Singgih. 2018. *SPSS 22 From Essential to Expert Skills*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sarwono, Jonathan dan Budiono, Herlina. 2012. *Statistik Terapan: Aplikasi Untuk Riset Skripsi, Tesis dan Desertasi (Menggunakan SPSS, AMOS dan Excel)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar*:

- Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Syofian. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi (Metode R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik & Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta pusat: PT. Pustaka Indonsia Press.
- Wibowo dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Jember University Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Widhi, Agung dan Zarah. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses dan Studi Komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

### **Jurnal**

Arizona, M. M. (2012). Kajian Tentang Siswa Putus Sekolah Pada Tingkat SMA/SMK Di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik).

Ashiong P. Munthe. (2015). Disampaikan dalam Workshop untuk Mahasiswa tentang Penelitian Metode Kuantitatif dan Kualitatif di Fakultas Ilmu Pendidikan UPH, Karawaci, 16 dan 23 Juni 2015., 1–14.

Basrowi dan Siti Juariyah. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Marringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7(April), 58–81.

Ekustyana. (2017). Administrasi publik dalam perspektif ekologi. *FISIP UIN Sunan Gunung Jati*, 7, 11.

Irawati, N. (2013). Hubungan Kualitas Pegawai Dengan Efektivitas Organisasi di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. *Naskah Publikasi*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Ratna. Dewi, Made. Yudana, Agung.Gede. (2015). Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng, 6(1).

### **Skripsi**

Baskoro, Agus. 2016. Efektivitas Program Bidik Misi di Universitas Negeri Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Rossalia, Winda. 2018. Evaluasi Program Siswa Asuh Sebaya Pada Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Banyuwangi. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.

Setyawati, Saras. 2018. Efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Keccamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 tahun 2015 tentang program indonesia pintar).*Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Setiyawati, Rima.2014. Peranan Dukun Bayi Dalam Perspektif Masyarakat Jawa Terhadap Proses Persalinan Di Dusun Nolopriyani Desa Jatirejo Kabupaten Semarang Jawa Tengah (Melalui Pendekatan Teori Solidaritas Mekanik dan Organik Emile Durkheim).*Skripsi*. Jakarta. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.

### Internet

Banyuwangi. Profil Pendidikan.

<https://banyuwangikab.go.id/new/profil/profil-pendidikan.html>

[Diakses pada 27 Oktober 2018]

JPIP. Karena Risau Seragam Lusuh Tanpa APBD, Siswa Selamatkan 100 Ribu Temannya dari Putus Sekolah

<http://www.jpip.or.id/artikelview-635.html>

[Diakses pada 5 November 2018]

Kompas. 2017. Kenaikan Gaji Lebih Kecil dari Kenaikan Biaya Pendidikan Solusinya.

<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/07/17/084700526/kenaikan-gaji-lebih-kecil-dari-kenaikan-biaya-pendidikan-solusinya->

[Diakses pada 3 Desember 2018]

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2016. Program Siswa Asuh Sebaya Banyuwangi Raih Penghargaan Kompetisi Pelayanan Publik.

<https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/program-siswa-asuh-sebaya-banyuwangi-raih-penghargaan-kompetisi-pelayanan-publik.html>

[Diakses tanggal 5 november 2018]

Tempo. 2016. RAPBN 2017 Lima Sektor Prioritas Pemerintahan Jokowi.

<https://bisnis.tempo.co/read/796572/rapbn-2017-lima-sektor-prioritas-pemerintahan-jokowi>

[Diakses tanggal 5 november 2018]

SMAN 1 Giri. Profil Sekolah

Sumber: <http://sman1giri.siapsekolah.com/sekolahprofil/#.XMhfqh4xc0M>

[Diakses tanggal 15 April 2019 ]

SMAN 1 Glenmore. Profil Sekolah

<http://smanegeri1glenmore.siap-sekolah.com/sekolahprofil/#.XMv5uh4xc0M>

[Diakses tanggal 15 April 2019]

Student CNN Indonesia. Tingginya Angka Putus Sekolah di Indonesia

<https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/>

[Diakses pada 29 Oktober 2018]

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016

<https://banyuwangi.kab.go.id>

[Diakses pada 29 Oktober 2018]

### **Peraturan**

Keputusan kepala dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/1416/429.101/2015. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Siswa Asuh Sebaya (SAS) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi*. 21 April 2015. Banyuwangi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta

Peraturan Bupati No.24 tahun 2017. *Program Siswa Asuh Sebaya*. 18 Mei 2017. Banyuwangi

Peraturan Kabupaten Banyuwangi No.5 tahun 2011. *Sistem Penyelenggaraan Pendidikan*. 15 Juni 2011. Banyuwangi

## Lampiran 1

**KUESIONER PENELITIAN****DATA RESPONDEN**

Nama : .....

Umur : .....Tahun

Kelas : .....

Jurusan : .....

Asal Sekolah : .....

Jenis Kelamin : Pria / Wanita \*

(\*) : coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN**

Mohon berikan tanda check mark (√) pada salah satu kolom yang paling sesuai dengan apa yang saudara/saudari rasakan. Berikut adalah keterangan pilihan jawaban:

STS	TS	KS	S	SS
<b>Sangat Tidak Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Kurang Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Sangat Setuju</b>

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
	<b>Akses</b>					
1	Pengurus SAS memiliki keterbukaan informasi terkait program SAS					
2	Mekanisme pendaftaran program SAS mudah					
3	Berkas pendaftaran program SAS mudah dipenuhi					
4	Pengurus SAS membuka kesempatan akses yang sama bagi calon/siswa penerima SAS					
5	Pengurus SAS menerima pengaduan saat terjadi masalah					

	<b>Cakupan</b>					
6	Siswa kurang mampu menjadi cakupan utama sasaran program SAS					
7	100% siswa kurang mampu telah mendapatkan program SAS					
	<b>Frekuensi</b>					
8	Program SAS dilaksanakan setiap tahun					
9	Bantuan program SAS diberikan setiap bulan					
10	Bantuan program SAS diberikan sekali dalam satu semester					
	<b>Bias</b>					
11	Siswa penerima SAS telah memanfaatkan bantuan dengan tepat					
12	Terdapat siswa diluar kriteria yang saat ini mendapatkan program SAS					
	<b>Service delivery</b>					
13	Bantuan program SAS didistribusikan sesuai waktu yang dijadwalkan					
14	Bantuan program SAS diberikan sesuai waktu yang diharapkan					
	<b>Akuntabilitas</b>					
15	Warga sekolah mendapatkan laporan hasil penggalangan dana SAS secara berkala					
16	Bantuan SAS diberikan secara adil					
17	Bentuk bantuan yang diberikan sesuai komitmen pengurus SAS di awal program					
	<b>Kesesuaian program dengan kebutuhan</b>					
18	Bantuan SAS yang diberikan mampu meringankan biaya pendidikan					
19	Nilai manfaat program sesuai kebutuhan siswa penerima bantuan SAS					
20	Bantuan SAS mampu memotivasi siswa agar lebih rajin belajar					

## Lampiran 2

## TABULASI DATA

Tabel 4.9 Tabulasi data variabel efektivitas

No Responden	Asal Sekolah	Efektivitas																			Total x	
		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19		x20
1	Giri	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78
2	Giri	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	96
3	Giri	3	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	75
4	Giri	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78
5	Giri	4	4	5	5	4	4	4	2	2	5	4	2	5	2	4	4	4	4	4	4	76
6	Giri	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	64
7	Giri	5	5	5	5	5	5	4	4	5	2	5	1	4	5	2	4	5	5	5	5	86
8	Giri	4	4	4	3	4	5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	5	4	4	82
9	Giri	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	72
10	Giri	3	4	4	4	4	4	1	4	1	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	70
11	Giri	5	5	4	4	5	5	5	5	5	2	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	87
12	Giri	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	5	80
13	Giri	4	4	4	5	5	5	3	5	5	2	5	3	4	4	3	5	4	4	4	4	82
14	Giri	4	4	5	5	5	4	3	2	5	2	4	3	3	3	3	4	3	5	5	5	77
15	Giri	4	4	3	3	3	5	5	2	2	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	83
16	Giri	4	4	4	4	3	5	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	79
17	Giri	5	5	4	4	4	5	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	77
18	Giri	3	2	4	4	4	2	4	4	3	3	2	4	3	4	3	4	3	3	3	3	65
19	Giri	1	4	5	5	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4	4	5	5	4	4	76

20	Giri	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	92
21	Giri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	97
22	Giri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	97
23	Giri	4	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	82
24	Giri	4	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	85
25	Giri	4	4	4	5	5	5	3	5	5	2	5	5	4	4	5	5	5	5	3	3	86
26	Giri	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	5	4	3	3	3	4	71
27	Giri	4	4	4	5	3	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	87
28	Giri	5	5	4	3	5	5	5	5	3	2	5	1	3	3	4	5	4	5	4	4	80
29	Giri	4	5	5	3	5	5	5	5	3	2	4	1	3	3	4	5	4	5	4	4	79
30	Giri	5	5	4	3	5	5	5	5	3	2	5	1	3	3	4	5	4	5	3	3	78
31	Giri	3	4	5	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	4	77
32	Giri	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	3	3	4	3	3	5	4	5	86
33	Giri	3	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4	3	2	4	4	4	5	5	4	4	78
34	Giri	3	4	5	5	5	4	4	3	3	3	4	3	2	4	4	4	5	5	4	4	78
35	Glenmore	5	4	5	4	5	4	3	0	4	5	5	2	5	5	4	4	4	4	3	4	79
36	Glenmore	4	4	4	4	4	5	5	0	5	0	1	0	4	4	4	4	4	5	4	4	69
37	Glenmore	4	4	2	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	2	2	4	3	4	4	4	71
38	Glenmore	4	4	4	4	4	5	5	2	4	2	4	2	5	4	4	4	4	4	4	4	77
39	Glenmore	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	76
40	Glenmore	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	81
41	Glenmore	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	96
42	Glenmore	5	4	4	4	4	5	5	3	5	4	5	3	5	5	4	5	4	5	5	4	88
43	Glenmore	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	93

Sumber: Data 2019 diolah

Lampiran 3

**HASIL UJI VALIDITAS**

**Correlations**

Correlations

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20	TOTAL _X	
x1	Pearson Correlation	1	,625 **	,097	,016	,300	,556 **	,380 *	,166	,435 **	- ,06 2	,482 **	,591 **	,591 **	,257	,181	,361 *	,114	,242	,282	,357 *	,597**
	Sig. (2- tailed)		,000	,534	,920	,050	,000	,012	,286	,004	,69 3	,001	,000	,000	,096	,245	,017	,468	,118	,067	,019	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
x2	Pearson Correlation	,625 **	1	,347 *	,151	,484 **	,723 **	,346 *	,277	,282	- ,16 4	,520 **	,176	,176	,156	,168	,355 *	,405 **	,636 **	,449 **	,433 **	,634**



	Sig. (2-tailed)	,050	,001	,000	,006		,069	,506	,120	,080	,155	,001	,506	,506	,104	,178	,089	,048	,001	,687	,068	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
x6	Pearson Correlation	,556**	,723**	,043	-,038	,280	1	,394**	,221	,374*	-,173	,504**	,320*	,320*	,325*	,211	,476**	,442**	,675**	,402**	,359*	,606**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,785	,811	,069		,009	,155	,014	,266	,001	,036	,036	,033	,173	,001	,003	,000	,007	,018	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
x7	Pearson Correlation	,380*	,346*	,025	-,090	,104	,394**	1	,114	,198	-,232	,189	,300	,300	,260	,345*	,398**	,364*	,445**	,294	,195	,429**
	Sig. (2-tailed)	,012	,023	,872	,568	,506	,009		,466	,203	,134	,225	,051	,051	,093	,023	,008	,016	,003	,055	,210	,004
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
x8	Pearson Correlation	,166	,277	,016	,114	,241	,221	,114	1	,085	-,042	,431**	-,022	-,022	,017	,176	,374*	,208	,162	,198	,072	,458**







	Sig. (2-tailed)	,468	,007	,016	,007	,048	,003	,016	,180	,368	,822	,002	,084	,084	,000	,001	,003		,000	,005	,027	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
x18	Pearson Correlation	,242	,636**	,325*	,111	,471**	,675**	,445**	,162	,252	-,205	,424**	-,053	-,053	,321*	,237	,433**	,549**	1	,441**	,323*	,560**
	Sig. (2-tailed)	,118	,000	,034	,479	,001	,000	,003	,300	,103	,187	,005	,736	,736	,036	,126	,004	,000		,003	,035	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
x19	Pearson Correlation	,282	,449**	,284	,333*	,063	,402**	,294	,198	,254	,048	,259	,403**	,403**	,404**	,224	,197	,419**	,441**	1	,677**	,620**
	Sig. (2-tailed)	,067	,003	,065	,029	,687	,007	,055	,202	,100	,761	,094	,007	,007	,007	,149	,205	,005	,003		,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
x20	Pearson Correlation	,357*	,433**	,412**	,464**	,281	,359*	,195	,072	,255	,210	,373*	,358*	,358*	,353*	,298	,038	,338*	,323*	,677**	1	,639**

	Sig. (2-tailed)	,019	,004	,006	,002	,068	,018	,210	,648	,099	,176	,014	,018	,018	,020	,052	,806	,027	,035	,000		,000
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
TOTAL_X	Pearson Correlation	,597**	,634**	,438**	,485**	,509**	,606**	,429**	,458**	,456**	,129	,729**	,529**	,529**	,600**	,584**	,488**	,675**	,560**	,620**	,639**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003	,001	,000	,000	,004	,002	,002	,410	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,000	
	N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). \* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran 4

**HASIL UJI RELIABILITAS****Reliability****Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	43	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	43	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,866	18

## Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1	70,19	54,822	,570	,855
x2	70,09	55,182	,661	,853
x3	69,91	58,229	,382	,863
x4	69,93	58,352	,352	,864
x5	69,88	57,010	,500	,859
x6	69,79	55,836	,641	,854
x7	70,28	56,206	,419	,862
x8	70,49	55,827	,274	,876
x9	70,49	54,351	,419	,865
x11	70,14	53,885	,630	,852
x13	70,33	56,511	,414	,862
x14	70,35	55,756	,530	,857
x15	70,21	56,788	,454	,860
x16	69,95	58,522	,504	,860
x17	70,09	55,801	,634	,854
x18	69,77	57,040	,590	,857
x19	70,05	56,617	,561	,857
x20	70,02	57,214	,560	,857

Lampiran 5

**HASIL UJI NORMALITAS DATA**

**Explore**

**Asal\_Sekolah**

**Case Processing Summary**

Asal_Sekolah		Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
34	SMAN 1 GIRI	34	100,0%	0	0,0%	34	100,0%
	SMAN 1 GLENMORE	9	100,0%	0	0,0%	9	100,0%

**Descriptives**

Asal_Sekolah			Statistic	Std. Error
34	SMAN 1 GIRI	Mean	54,01	1,620
95% Confidence Interval for Mean			Lower Bound	50,72
			Upper Bound	57,31
5% Trimmed Mean			53,96	
Median			53,13	
Variance			89,192	
Std. Deviation			9,444	
Minimum			34	

	Maximum		74	
	Range		40	
	Interquartile Range		10	
	Skewness		,139	,403
	Kurtosis		,358	,788
SMAN 1 GLENMORE	Mean		56,57	3,698
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	48,05	
		Upper Bound	65,10	
	5% Trimmed Mean		56,43	
	Median		53,06	
	Variance		123,081	
	Std. Deviation		11,094	
	Minimum		42	
	Maximum		74	
	Range		33	
	Interquartile Range		18	
	Skewness		,698	,717
	Kurtosis		-,532	1,400

## Tests of Normality

Asal_Sekolah		Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
34	SMAN 1 GIRI	,110	34	,200 <sup>*</sup>	,971	34	,486
	SMAN 1 GLENMORE	,285	9	,034	,890	9	,201

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

## Stem-and-Leaf Plots

34 Stem-and-Leaf Plot for

Asal\_Sekolah= SMAN 1 GIRI

Frequency Stem & Leaf

1,00 Extremes (<=34)

1,00 3 . 5

3,00 4 . 012

4,00 4 . 5888

10,00 5 . 0001122334

9,00 5 . 577777889

2,00 6 . 14

1,00 6 . 5

1,00 7 . 0

2,00 Extremes (>=74)

Stem width: 10

Each leaf: 1 case(s)

34 Stem-and-Leaf Plot for

Asal\_Sekolah= SMAN 1 GLENMORE

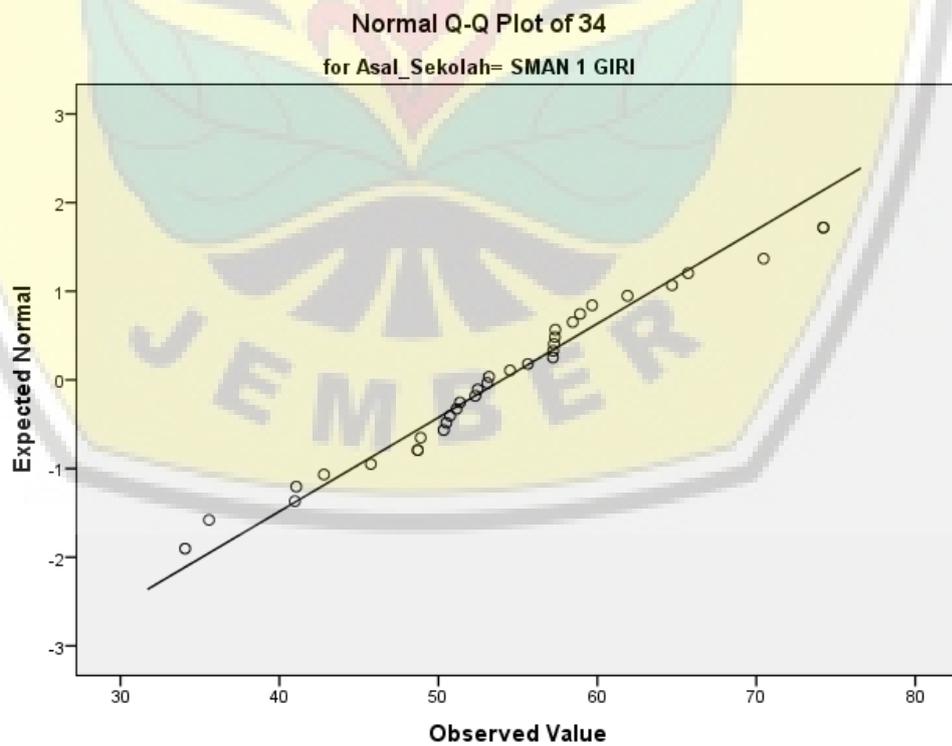
Frequency Stem & Leaf

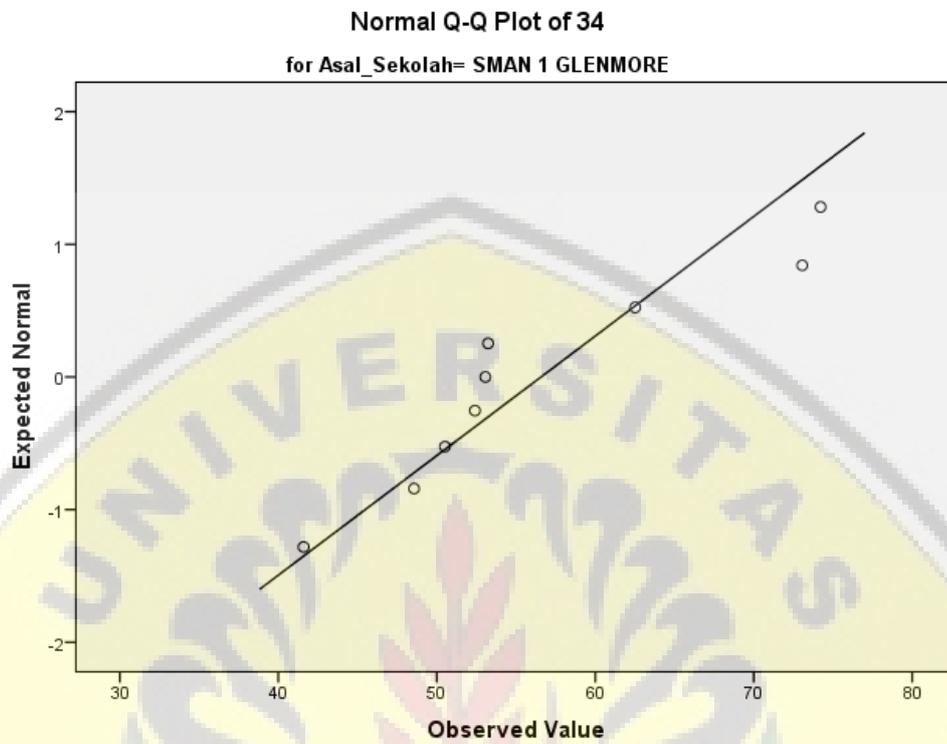
2,00	4 . 18
4,00	5 . 0233
1,00	6 . 2
2,00	7 . 34

Stem width: 10

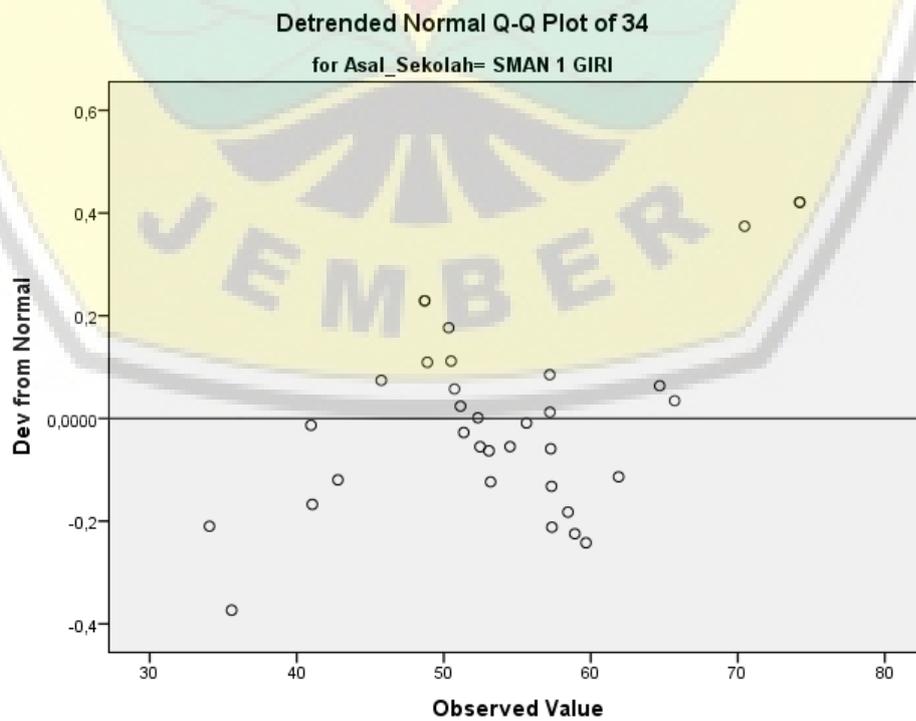
Each leaf: 1 case(s)

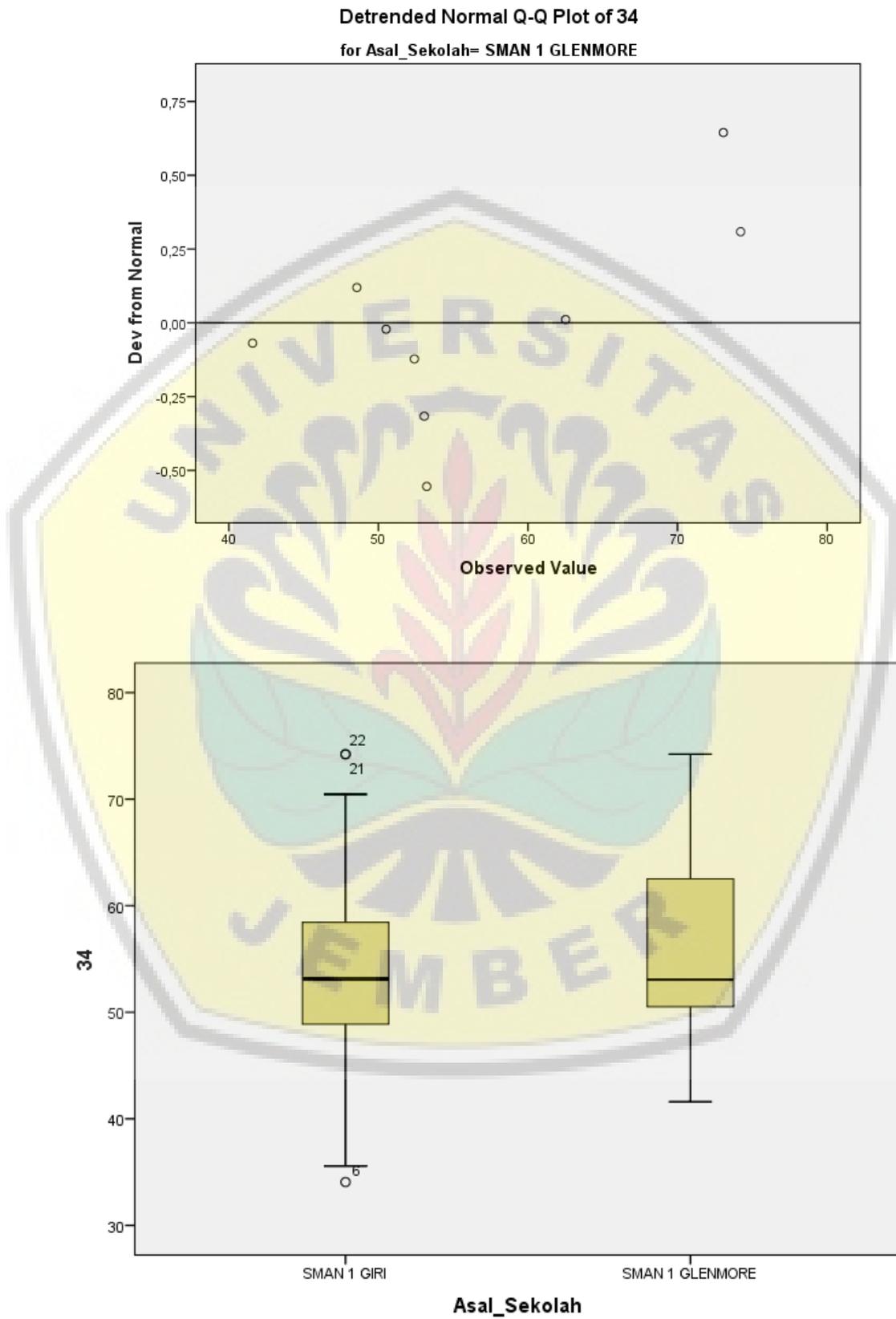
**Normal Q-Q Plots**





**Detrended Normal Q-Q Plots**





## Lampiran 6

**HASIL UJI HOMOGENITAS****Oneway****Warnings**

Post hoc tests are not performed for Total Skor because there are fewer than three groups.

**Descriptives**

Total Skor

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean
					Lower Bound
SMAN 1 Giri	34	54,01	9,444	1,620	50,72
SMAN 1 Glenmore	9	56,57	11,094	3,698	48,05
Total	43	54,55	9,728	1,484	51,55

**Descriptives**

Total Skor

	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
	Upper Bound			
SMAN 1 Giri	57,31	34	74	74
SMAN 1 Glenmore	65,10	42	74	74
Total	57,54	34	74	74

**Test of Homogeneity of Variances**

Total Skor

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
,637	1	41	,429

**ANOVA**

Total Skor

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	46,755	1	46,755	,488	,489
Within Groups	3927,988	41	95,805		
Total	3974,743	42			

Lampiran 7

**HASIL UJI INDEPENDENT SAMPEL T TEST****T-Test****Group Statistics**

Sekolah		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Total Skor	SMAN 1 Giri	34	54,01	9,444	1,620
	SMAN 1 Glenmore	9	56,57	11,094	3,698

**Independent Samples Test**

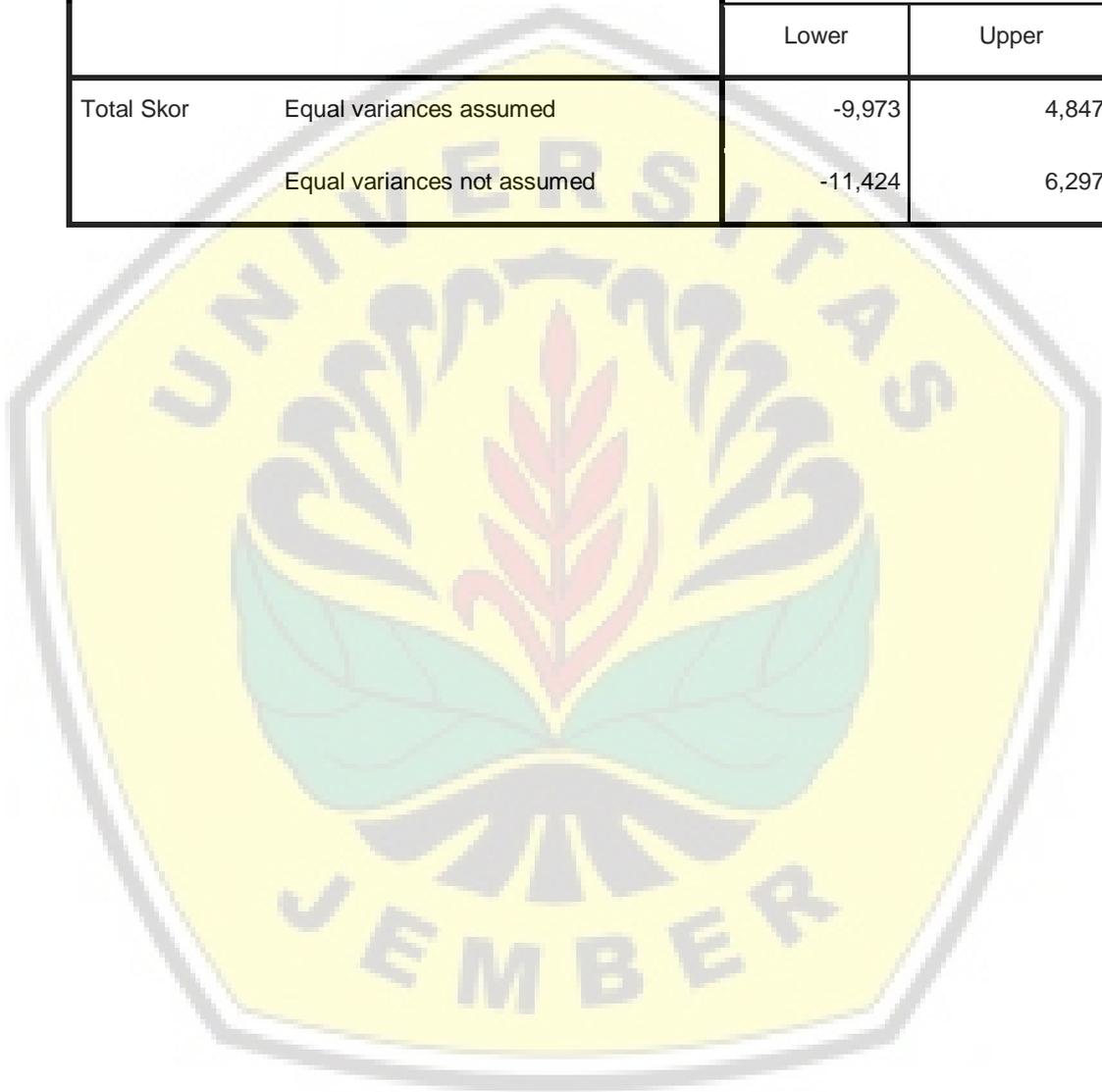
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means	
		F	Sig.	t	df
Total Skor	Equal variances assumed	,637	,429	-,699	41
	Equal variances not assumed			-,635	11,263

**Independent Samples Test**

		t-test for Equality of Means		
		Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
Total Skor	Equal variances assumed	,489	-2,563	3,669
	Equal variances not assumed	,538	-2,563	4,037

## Independent Samples Test

		t-test for Equality of Means	
		95% Confidence Interval of the Difference	
		Lower	Upper
Total Skor	Equal variances assumed	-9,973	4,847
	Equal variances not assumed	-11,424	6,297



Lampiran 8

**TRANSFORMASI DATA ORDINAL KE INTERVAL**

Tabulasi Data Ordinal (sebelum transformasi data)

Keterangan : Kode 1 = SMAN 1 Giri dan Kode 2 = SMAN 1 Glenmore

NO. RESPONDEN	KODE	EFEKTIVITAS																		TOTAL
		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x11	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20	SKOR
1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70
2	1	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4	5	5	5	5	5	5	86
3	1	3	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	67
4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70
5	1	4	4	5	5	4	4	4	2	2	4	5	2	4	4	4	4	4	4	69
6	1	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	58
7	1	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	2	4	5	5	5	5	83
8	1	4	4	4	3	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	75
9	1	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	65
10	1	3	4	4	4	4	4	1	4	1	4	3	3	3	4	4	4	4	4	62
11	1	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	81
12	1	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	74
13	1	4	4	4	5	5	5	3	5	5	5	4	4	3	5	4	4	4	4	77
14	1	4	4	5	5	5	4	3	2	5	4	3	3	3	4	3	5	5	5	72
15	1	4	4	3	3	3	5	5	2	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	75
16	1	4	4	4	4	3	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	72
17	1	5	5	4	4	4	5	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	71
18	1	3	2	4	4	4	2	4	4	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	58
19	1	1	4	5	5	5	4	4	3	3	4	2	4	4	4	5	5	4	4	70
20	1	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	83



Tabulasi Data Interval (setelah transformasi data)

NO. RESPONDEN	KODE	EFEKTIVITAS																		TOTAL
		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x11	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20	SKOR
1	1	3,2	2,8	2,9	2,2	2,2	2,7	3,4	2,6	2,0	3,1	3,0	3,2	3,0	2,9	2,3	2,4	2,3	2,5	48,7
2	1	4,5	4,3	4,3	3,5	3,5	4,1	4,5	3,8	2,0	4,5	4,2	3,2	4,4	4,5	3,7	3,9	3,7	3,9	70,5
3	1	2,1	1,0	2,9	2,2	2,2	2,7	3,4	2,6	2,0	3,1	3,0	3,2	3,0	2,9	2,3	2,4	2,3	2,5	45,8
4	1	3,2	2,8	2,9	2,2	2,2	2,7	3,4	2,6	2,0	3,1	3,0	3,2	3,0	2,9	2,3	2,4	2,3	2,5	48,7
5	1	3,2	2,8	4,3	3,5	2,2	2,7	3,4	1,0	2,0	3,1	4,2	1,0	3,0	2,9	2,3	2,4	2,3	2,5	48,9
6	1	2,1	1,6	1,7	1,0	1,0	2,7	2,3	2,6	2,8	2,1	2,0	2,1	1,9	2,9	1,0	2,4	1,0	1,0	34,1
7	1	4,5	4,3	4,3	3,5	3,5	4,1	3,4	2,6	4,5	4,5	3,0	4,5	1,0	2,9	3,7	3,9	3,7	3,9	65,7
8	1	3,2	2,8	2,9	1,0	2,2	4,1	3,4	2,6	4,5	3,1	3,0	3,2	3,0	4,5	2,3	3,9	2,3	2,5	54,5
9	1	2,1	2,8	2,9	2,2	2,2	2,7	2,3	2,6	2,8	2,1	2,0	2,1	3,0	2,9	1,0	2,4	2,3	2,5	42,8
10	1	2,1	2,8	2,9	2,2	2,2	2,7	1,0	2,6	1,0	3,1	2,0	2,1	1,9	2,9	2,3	2,4	2,3	2,5	41,0
11	1	4,5	4,3	2,9	2,2	3,5	4,1	4,5	3,8	4,5	3,1	3,0	3,2	3,0	2,9	2,3	3,9	3,7	2,5	61,9
12	1	3,2	2,8	2,9	2,2	2,2	4,1	3,4	2,6	3,5	3,1	3,0	3,2	3,0	2,9	2,3	2,4	2,3	3,9	53,1
13	1	3,2	2,8	2,9	3,5	3,5	4,1	2,3	3,8	4,5	4,5	3,0	3,2	1,9	4,5	2,3	2,4	2,3	2,5	57,2
14	1	3,2	2,8	4,3	3,5	3,5	2,7	2,3	1,0	4,5	3,1	2,0	2,1	1,9	2,9	1,0	3,9	3,7	3,9	52,3
15	1	3,2	2,8	1,7	1,0	1,0	4,1	4,5	1,0	2,0	3,1	4,2	4,5	4,4	4,5	3,7	3,9	3,7	3,9	57,2
16	1	3,2	2,8	2,9	2,2	1,0	4,1	2,3	2,6	3,5	3,1	3,0	3,2	3,0	2,9	2,3	2,4	3,7	2,5	50,7
17	1	4,5	4,3	2,9	2,2	2,2	4,1	2,3	1,8	3,5	2,1	3,0	3,2	1,9	2,9	2,3	2,4	2,3	2,5	50,3
18	1	2,1	1,0	2,9	2,2	2,2	1,0	3,4	2,6	2,8	1,5	2,0	3,2	1,9	2,9	1,0	1,0	1,0	1,0	35,6
19	1	1,0	2,8	4,3	3,5	3,5	2,7	3,4	1,8	2,8	3,1	1,0	3,2	3,0	2,9	3,7	3,9	2,3	2,5	51,4
20	1	3,2	2,8	2,9	3,5	3,5	4,1	3,4	3,8	4,5	4,5	3,0	4,5	4,4	2,9	3,7	3,9	2,3	3,9	64,7
21	1	4,5	4,3	4,3	3,5	3,5	4,1	4,5	3,8	4,5	4,5	4,2	4,5	4,4	4,5	3,7	3,9	3,7	3,9	74,2
22	1	4,5	4,3	4,3	3,5	3,5	4,1	4,5	3,8	4,5	4,5	4,2	4,5	4,4	4,5	3,7	3,9	3,7	3,9	74,2
23	1	3,2	2,8	4,3	3,5	3,5	2,7	2,3	2,6	3,5	3,1	3,0	3,2	3,0	2,9	2,3	2,4	2,3	2,5	53,2
24	1	3,2	2,8	4,3	3,5	3,5	2,7	2,3	2,6	3,5	3,1	3,0	3,2	4,4	2,9	2,3	2,4	3,7	3,9	57,4

25	1	3,2	2,8	2,9	3,5	3,5	4,1	2,3	3,8	4,5	4,5	3,0	3,2	4,4	4,5	3,7	3,9	1,0	1,0	59,7
26	1	3,2	1,6	2,9	2,2	2,2	1,5	2,3	1,8	3,5	2,1	3,0	2,1	4,4	2,9	1,0	1,0	1,0	2,5	41,1
27	1	3,2	2,8	2,9	3,5	1,0	2,7	4,5	3,8	4,5	3,1	4,2	3,2	4,4	2,9	3,7	2,4	3,7	2,5	58,9
28	1	4,5	4,3	2,9	1,0	3,5	4,1	4,5	3,8	2,8	4,5	2,0	2,1	3,0	4,5	2,3	3,9	2,3	2,5	58,4
29	1	3,2	4,3	4,3	1,0	3,5	4,1	4,5	3,8	2,8	3,1	2,0	2,1	3,0	4,5	2,3	3,9	2,3	2,5	57,3
30	1	4,5	4,3	2,9	1,0	3,5	4,1	4,5	3,8	2,8	4,5	2,0	2,1	3,0	4,5	2,3	3,9	1,0	1,0	55,6
31	1	2,1	2,8	4,3	2,2	2,2	2,7	2,3	2,6	2,8	2,1	3,0	3,2	3,0	2,9	2,3	3,9	3,7	2,5	50,5
32	1	4,5	4,3	4,3	3,5	3,5	4,1	3,4	2,6	3,5	4,5	2,0	2,1	3,0	1,0	1,0	3,9	2,3	3,9	57,3
33	1	2,1	2,8	4,3	3,5	2,2	2,7	3,4	1,8	2,8	3,1	1,0	3,2	3,0	2,9	3,7	3,9	2,3	2,5	51,1
34	1	2,1	2,8	4,3	3,5	3,5	2,7	3,4	1,8	2,8	3,1	1,0	3,2	3,0	2,9	3,7	3,9	2,3	2,5	52,5
35	2	4,5	2,8	4,3	2,2	3,5	2,7	2,3	0,0	3,5	4,5	4,2	4,5	3,0	2,9	2,3	2,4	1,0	2,5	53,1
36	2	3,2	2,8	2,9	2,2	2,2	4,1	4,5	0,0	4,5	1,0	3,0	3,2	3,0	2,9	2,3	3,9	2,3	2,5	50,5
37	2	3,2	2,8	1,0	2,2	1,0	2,7	3,4	2,6	3,5	3,1	3,0	1,0	1,0	2,9	1,0	2,4	2,3	2,5	41,6
38	2	3,2	2,8	2,9	2,2	2,2	4,1	4,5	1,0	3,5	3,1	4,2	3,2	3,0	2,9	2,3	2,4	2,3	2,5	52,4
39	2	3,2	2,8	2,9	2,2	2,2	2,7	3,4	1,0	3,5	3,1	3,0	3,2	3,0	2,9	2,3	2,4	2,3	2,5	48,6
40	2	3,2	2,8	4,3	3,5	2,2	2,7	3,4	2,6	3,5	3,1	3,0	2,1	3,0	2,9	2,3	2,4	2,3	3,9	53,2
41	2	4,5	4,3	4,3	3,5	3,5	4,1	3,4	3,8	4,5	4,5	4,2	4,5	4,4	4,5	3,7	3,9	3,7	3,9	73,1
42	2	4,5	2,8	2,9	2,2	2,2	4,1	4,5	1,8	4,5	4,5	4,2	4,5	3,0	4,5	2,3	3,9	3,7	2,5	62,5
43	2	4,5	4,3	4,3	3,5	3,5	4,1	4,5	3,8	4,5	4,5	4,2	4,5	4,4	4,5	3,7	3,9	3,7	3,9	74,2

## Lampiran 9

TABEL NILAI-NILAI  $r$  PRODUCT MOMENT

N	Taraf Signif		N	Taraf Signif		N	Taraf Signif	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	27	0.381	0.487	55	0.266	0.345
4	0.950	0.990	28	0.374	0.478	60	0.254	0.330
5	0.878	0.959	29	0.367	0.470	65	0.244	0.317
6	0.811	0.917	30	0.361	0.463	70	0.235	0.306
7	0.754	0.874	31	0.355	0.456	75	0.227	0.296
8	0.707	0.834	32	0.349	0.449	80	0.220	0.286
9	0.666	0.798	33	0.344	0.442	85	0.213	0.278
10	0.632	0.765	34	0.339	0.436	90	0.207	0.270
11	0.602	0.735	35	0.334	0.430	95	0.202	0.263
12	0.576	0.708	36	0.329	0.424	100	0.195	0.256
13	0.553	0.684	37	0.325	0.418	125	0.176	0.230
14	0.532	0.661	38	0.320	0.413	150	0.159	0.210
15	0.514	0.641	39	0.316	0.408	175	0.148	0.194
16	0.497	0.623	40	0.312	0.403	200	0.138	0.181
17	0.482	0.606	41	0.308	0.398	300	0.113	0.148
18	0.468	0.590	42	0.304	0.393	400	0.098	0.128
19	0.456	0.575	43	0.301	0.389	500	0.088	0.115
20	0.444	0.561	44	0.297	0.384	600	0.080	0.105
21	0.433	0.549	45	0.294	0.380	700	0.074	0.097
22	0.423	0.537	46	0.291	0.376	800	0.070	0.091
23	0.413	0.526	47	0.288	0.372	900	0.065	0.086
24	0.404	0.515	48	0.284	0.368	1000	0.062	0.081
25	0.396	0.505	49	0.281	0.364			
26	0.388	0.496	50	0.279	0.361			

## Lampiran 10

**TABEL DISTRIBUSI NILAI t (df 41-80)**

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	130.254	168.288	201.954	242.080	270.118	330.127
42	0.68038	130.204	168.195	201.808	241.847	269.807	329.595
43	0.68024	130.155	168.107	201.669	241.625	269.510	329.089
44	0.68011	130.109	168.023	201.537	241.413	269.228	328.607
45	0.67998	130.065	167.943	201.410	241.212	268.959	328.148
46	0.67986	130.023	167.866	201.290	241.019	268.701	327.710
47	0.67975	129.982	167.793	201.174	240.835	268.456	327.291
48	0.67964	129.944	167.722	201.063	240.658	268.220	326.891
49	0.67953	129.907	167.655	200.958	240.489	267.995	326.508
50	0.67943	129.871	167.591	200.856	240.327	267.779	326.141
51	0.67933	129.837	167.528	200.758	240.172	267.572	325.789
52	0.67924	129.805	167.469	200.665	240.022	267.373	325.451
53	0.67915	129.773	167.412	200.575	239.879	267.182	325.127
54	0.67906	129.743	167.356	200.488	239.741	266.998	324.815
55	0.67898	129.713	167.303	200.404	239.608	266.822	324.515
56	0.67890	129.685	167.252	200.324	239.480	266.651	324.226
57	0.67882	129.658	167.203	200.247	239.357	266.487	323.948
58	0.67874	129.632	167.155	200.172	239.238	266.329	323.680
59	0.67867	129.607	167.109	200.100	239.123	266.176	323.421
60	0.67860	129.582	167.065	200.030	239.012	266.028	323.171
61	0.67853	129.558	167.022	199.962	238.905	265.886	322.930
62	0.67847	129.536	166.980	199.897	238.801	265.748	322.696
63	0.67840	129.513	166.940	199.834	238.701	265.615	322.471
64	0.67834	129.492	166.901	199.773	238.604	265.485	322.253
65	0.67828	129.471	166.864	199.714	238.510	265.360	322.041
66	0.67823	129.451	166.827	199.656	238.419	265.239	321.837
67	0.67817	129.432	166.792	199.601	238.330	265.122	321.639
68	0.67811	129.413	166.757	199.547	238.245	265.008	321.446
69	0.67806	129.394	166.724	199.495	238.161	264.898	321.260
70	0.67801	129.376	166.691	199.444	238.081	264.790	321.079
71	0.67796	129.359	166.660	199.394	238.002	264.686	320.903
72	0.67791	129.342	166.629	199.346	237.926	264.585	320.733
73	0.67787	129.326	166.600	199.300	237.852	264.487	320.567
74	0.67782	129.310	166.571	199.254	237.780	264.391	320.406
75	0.67778	129.294	166.543	199.210	237.710	264.298	320.249
76	0.67773	129.279	166.515	199.167	237.642	264.208	320.096
77	0.67769	129.264	166.488	199.125	237.576	264.120	319.948
78	0.67765	129.250	166.462	199.085	237.511	264.034	319.804
79	0.67761	129.236	166.437	199.045	237.448	263.950	319.663
80	0.67757	129.222	166.412	199.006	237.387	263.869	319.526

Lampiran 11

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Foto bersama Ibu Rini selaku pembina SAS di SMA Negeri 1 Giri



Foto bersama pengurus SAS SMA Negeri 1 Giri



Foto bersama Ibu Titik selaku pembina SAS di SMA Negeri 1 Glenmore



Foto bersama pengurus SAS SMA Negeri 1 Glenmore

Lampiran 12

**LAPORAN PENGGALANGAN DANA SAS DI SMA NEGERI 1 GIRI**

**LAPORAN HASIL PENGGALANGAN DANA SAS**  
**SMA NEGERI 1 GIRI**  
**PERIODE II/TAHUN 2019**

No.	Bulan	Keterangan	Jumlah
1	Februari	Bantuan dari 818 siswa	Rp 4.085.000
2	Maret	Bantuan dari 780 siswa	Rp 3.915.000
3	April	Bantuan dari 540 siswa	Rp 2.700.000
4	Mei	Bantuan dari 578 siswa	Rp 2.900.000
5	Juni	Bantuan dari 535 siswa	Rp 2.895.000
6	Juli	Bantuan dari 563 siswa	Rp 2.775.000
Total pemasukan			Rp 19.270.000
Saldo SAS sebelumnya			Rp 22.885.000
Saldo SAS saat ini			Rp 42.155.000

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Giri,  
Ketua SAS

H. Mujib, S.Pd, M.M  
NIP. 19660710 198901 1002

Rini Astuti Puspa H, S.Pd.  
NIP.197403262014072002

Mielda Auliya Ferdiansyah  
NIS.15139

## Lampiran 12

## LAPORAN PENGGALANGAN DANA SAS DI SMA NEGERI 1 GLENMORE

**BUKU KAS**  
**SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**SMA NEGERI 1 GLENMORE**  
**TAHUN 2019**

Penerimaan				Pengeluaran			
No.	Tanggal	Uraian	Jumlah	No.	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	27 Februari 2019	Kontribusi 852 siswa	Rp 2.615.000	1	28 Februari 2019	Diserahkan kepada 12 siswa	Rp 2.400.000
2	29 Maret 2019	Kontribusi 885 siswa	Rp 3.230.000	2	30 Maret 2019	Di serahkan kepada 12 siswa	Rp 2.400.000
3	29 April 2019	Kontribusi 835 siswa	Rp 2.405.000	3	30 April 2019	Di serahkan kepada 12 siswa	Rp 2.400.000
4	30 Mei 2019	Kontribusi 690 siswa	Rp 1.817.000	4	31 Mei 2019	Di serahkan kepada 9 siswa	Rp 1.800.000
5	28 Juni 2019	Kontribusi 669 siswa	Rp 1.432.000	5	29 Juni 2019	Di serahkan kepada 9 siswa	Rp 1.800.000
6	30 Juli 2019	Kontribusi 776 siswa	Rp 1.889.000	6	31 Juli 2019	Di serahkan kepada 9 siswa	Rp 1.800.000
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
Jumlah Penerimaan			Rp 13.388.000	Jumlah Pengeluaran			Rp 12.600.000
				Saldo Akhir			Rp 788.000

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Pembina

Glenmore, 1 Agustus 2019  
Ketua Pelaksana Program

**Abdullah, S.Pd, M.T**  
NIP. 19681115 199403 1 004

**Titik Purwaning W, S.Pd**  
NIP. 19720627 200701 2010

**Afifah Amaliah Afandi**  
NIS.04157

Lampiran 13

**SURAT IZIN PENELITIAN DARI LP2M UNIVERSITAS JEMBER**

 **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Email : [penelitian.lp2m@unej.ac.id](mailto:penelitian.lp2m@unej.ac.id) - [pengabdian.lp2m@unej.ac.id](mailto:pengabdian.lp2m@unej.ac.id)

---

Nomor : 1130 /UN25.3.1/LT/2019  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

15 April 2019

Yth. Kepala  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Banyuwangi  
Di  
Banyuwangi

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1346/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 10 April 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Nanda Bintang Syahputra  
NIM : 150910201007  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Jl. Jawa VII No.104 Sumbersari-Jember  
Judul Penelitian : "Perbandingan Tingkat Efektifitas Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di SMAN 1 Giri dan SMAN 1 Glenmore Kabupaten Banyuwangi"  
Lokasi Penelitian : 1. SMAN 1 Giri Kabupaten Banyuwangi  
2. SMAN 1 Glenmore Kabupaten Banyuwangi  
Lama Penelitian : 1 Bulan (1 Mei-2 Juni 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

  
a.n. Ketua  
Sekretaris II,  
**Dr. Suwanto, M.Pd.**  
196306161988021001

Tembusan Yth

1. Kepala SMAN 1 Giri;
2. Kepala SMAN 1 Glenmore;
3. Dekan FISIP Universitas Jember;
4. Mahasiswa ybs; ✓
5. Arsip.

 **KAN**  
CERTIFICATE NO : QMS/173

## Lampiran 14

**SURAT IZIN PENELITIAN DARI DPM PTSP KAB. BANYUWANGI**

 **PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416  
Telepon (0333) 412343 Faks (0333) 412343  
email : dpmptsp@banyuwangkab.go.id website : www.dpmptspbwi.banyuwangkab.go.id

Banyuwangi, 24 April 2019

Kepada :

Nomor	: 072/ 443 /REKOM/429.113/2019	Yth. Sdr	1. Kepala Dinas Pendidikan
Sifat	: Biasa		2. Kepala Sekolah SMAN 1 Giri
Lampiran	: -		3. Kepala Sekolah SMAN 1 Glenmore
Perihal	: <u>Surat Pengantar Penelitian/Survey/Research</u>		Kab. Banyuwangi

di  
**BANYUWANGI**

Menunjuk Surat : Sekretaris II Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Tanggal : 15 April 2019  
Nomor : 1130/UN25.3.1/LT/2019

Maka dengan ini memberi Pengantar dalam rangka Pengantar Penelitian kepada :

Nama : Nanda Bintang Syahputra  
NIM : 150910201007  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

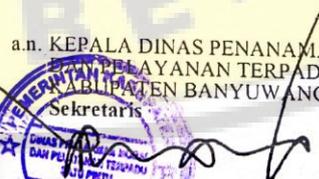
Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Survey/Research:

Judul : Perbandingan Tingkat Efektifitas Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di SMAN 1 Giri dan SMAN 1 Glenmore Kabupaten Banyuwangi  
Tempat : SMAN 1 Giri Banyuwangi, SMAN 1 Glenmore Banyuwangi  
Waktu : 1 Bulan (1 Mei s/d Juni 2019)

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Instansi tempat pelaksanaan penelitian.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUWANGI  
Sekretaris

  
**NUR AGUS SUHARTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660804 199403 1 009

Lampiran 15

**PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SISWA ASUH SEBAYA**



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG  
PROGRAM SISWA ASUH SEBAYA  
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberi peran kepada masyarakat untuk membantu meringankan biaya pendidikan siswa yang tidak mampu secara ekonomi pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, perlu menetapkan Program Siswa Asuh Sebaya dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);
  11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Mengajar (berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 34).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SISWA ASUH SEBAYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;

6. Siswa Asuh Sebaya adalah siswa didik yang dibiayai oleh teman sebaya dalam 1 (satu) sekolah yang sama karena secara ekonomi tidak mampu untuk membiayai pendidikannya.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Program Siswa Asuh Sebaya adalah sebagai wujud kepedulian masyarakat yang dilakukan oleh para siswa didik yang mampu secara ekonomi untuk membantu meringankan biaya pendidikan kepada sesama teman satu sekolah yang kurang mampu secara ekonomi.

## BAB III SASARAN

### Pasal 3

Sasaran Program Siswa Asuh Sebaya adalah siswa pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang secara ekonomi kurang mampu membiayai pendidikannya.

## BAB IV BANTUAN

### Pasal 4

- (1) Penilaian ketidakmampuan siswa secara ekonomi untuk membiayai pendidikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah.
- (2) Setelah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah memberi himbuan kepada siswa secara sukarela untuk membantu teman satu sekolahnya yang kurang mampu dan tidak ditentukan jumlah nominal bantuannya.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 5

Guna optimalisasi keberhasilan Program Siswa Asuh Sebaya, kepala dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Siswa Asuh Sebaya, dengan cara sebagai berikut:

- a. memberikan pembinaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah, Ibtidaiyah/Sekolah, Menengah Pertama/Madrasah, Tsanawiyah untuk menyukseskan program Siswa Asuh Sebaya.
- b. membuat petunjuk teknis pelaksanaan program Siswa Asuh Sebaya.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/182/KEP/429.011/2014 tentang Program Siswa Asuh Sebaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada  
tanggal 18 Mei 2017 BUPATI  
BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada  
tanggal 18 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19591227 198603 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 24

Lampiran 16

**PERATURAN DAERAH TENTANG SISWA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN (PASAL 3 DAN 5)**



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai kewenangannya mempunyai kewajiban dalam membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas;
  - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan serta mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, budaya dan kemajemukan suku serta adat istiadat daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah dibidang pendidikan sesuai kewenangannya;

- d. bahwa bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  13. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
10. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam

- menyelenggarakan pendidikan.
12. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
  13. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
  14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
  15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
  17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
  18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
  19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
  20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup penyelenggaraan pendidikan pada:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan menengah.

## BAB III VISI, MISI, MAKSUD, DAN TUJUAN Pasal 3

Visi Pendidikan Daerah adalah Pendidik yang berkualitas, berbudaya, berkebangsaan, berwawasan global, dan terjangkau masyarakat.

## Pasal 4

Misi Pendidikan Daerah adalah:

- a. mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat agar penyelenggaraan pendidikan di Daerah memiliki standar kualitas yang tinggi dan terjangkau, sehingga mempunyai keunggulan kompetitif yang mempunyai daya saing tinggi;
- b. menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional, dan spiritual;
- c. menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul;
- d. menciptakan atmosfir pendidikan yang kondusif;
- e. mengantisipasi dan menghilangkan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
- g. membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal serta pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

## Pasal 5

Maksud penyelenggaraan pendidikan adalah mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas, menjamin perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.

